



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2022, yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nomor 4817);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8.Peraturan...

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara nomor 6323);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 754).
15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 nomor 29).

Memutuskan : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Kepala Bapelitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD menjadi dasar penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2022 dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun anggaran 2022 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun 2022;
 - c. BAB III : Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapelitbang.

Pasal 5

Kepala Bapelitbang menelaah kesesuaian antara perubahan rencana kerja PD dan Perubahan RKA-PD dengan Perubahan RKPD.

BAB IV ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 Agustus 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 41



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Kabupaten Bintan dapat merampungkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2022 ini.

Penyusunan Perubahan RKPD berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan demikian, pada penyusunan dokumen P-RKPD tahun 2022 ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sesuai yang tercantum dalam RPJMD. Selain itu, penyelarasan dilakukan juga dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah yang tertuang dalam rancangan RKP serta program strategis nasional lainnya.

Dalam proses penyusunannya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen P-RKPD Tahun 2022 ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam membangun Kabupaten Bintan yang kita cintai bersama ini.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Hubungan Antar Dokumen	8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II.....	9
2.1 Capaian Kinerja Makro	9
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	9
2.1.2 Angka Kemiskinan.....	10
2.1.3 Angka Pengangguran	11
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	12
2.1.5 Pendapatan Per Kapita	13
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan	14
2.2 Evaluasi Hasil Triwulan Dua Tahun 2022	16
2.2.1 Kinerja Fisik dan Keuangan Sub Kegiatan	16
2.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut.....	32
2.3.1 Permasalahan	32
2.3.2 Tindak Lanjut	33
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	34
3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.....	34
3.1.1 Perubahan Arah Kebijakan Perekonomian Nasional.....	34
3.1.2 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau	36
3.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Bintan	39
3.2 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah.....	42
3.2.1 Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	43
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	46

4.1.1 Sasaran Pembangunan Nasional	46
4.1.2 Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	48
4.1.3 Sasaran Pembangunan Kabupaten Bintan	54
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	56
4.2.1 Sasaran Pembangunan Nasional	56
4.2.2 Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	58
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2022	64
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	74
5.1 Rencana Kerja.....	74
5.2 Pendanaan Pembangunan Daerah	412
5.2.1 Prioritas Pendanaan.....	412
5.2.2 Sumber Pendanaan Pembangunan	412
5.2.3 Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pendanaan.....	413
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	416
BAB VII PENUTUP.....	428

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekap Persentase Capaian Evaluasi Hasil RKPD TW II tahun 2022 Per Perangkat Daerah	16
Tabel II.2 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pendidikan.....	18
Tabel II.3 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kesehatan.....	18
Tabel II.4 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	19
Tabel II.5 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	19
Tabel II.6 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	20
Tabel II.7 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Sosial.....	20
Tabel II.8 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Tenaga Kerja.....	20
Tabel II.9 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21
Tabel II.10 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pangan.....	21
Tabel II.11 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pertanian	21
Tabel II.12 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Lingkungan Hidup	22
Tabel II.13 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	22
Tabel II.14 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	23
Tabel II.15 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana	23
Tabel II.16 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perhubungan	23
Tabel II.17 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Komunikasi dan Informatika	24
Tabel II.18 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	24
Tabel II.19 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Penanaman Modal	24
Tabel II.20 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25
Tabel II.21 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Statistika	25
Tabel II.22 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Persandian.....	25
Tabel II.23 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kebudayaan.....	26
Tabel II.24 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perpustakaan.....	26
Tabel II.25 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Arsip	26
Tabel II.26 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perikanan dan Kelautan	26
Tabel II.27 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pertanian	27
Tabel II.28 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pariwisata	27
Tabel II.29 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perdagangan	28
Tabel II.30 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perindustrian	28
Tabel II.31 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Sekretariat Daerah	28
Tabel II.32 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Sekretariat DPRD..	28
Tabel II.33 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perencanaan	29
Tabel II.34 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Keuangan.....	29
Tabel II.35 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kepegawaian	30

Tabel II.36 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pendidikan dan Pelatihan.....	30
Tabel II.37 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Penelitian dan Pengembangan.....	30
Tabel II.38 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pengelolaan Perbatasan.....	30
Tabel II.39 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pengawasan.....	31
Tabel II.40 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kewilayahan.....	31
Tabel II.41 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.....	31
Tabel III.1 Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Per Triwulan I Tahun 2022.....	41
Tabel III.2 Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2022.....	45
Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	51
Tabel IV.2 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.....	61
Tabel IV.3 Prioritas RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2022.....	65
Tabel IV.4 Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bintan Tahun 2022 ..	66
Tabel IV.5 Sasaran, Indikator, dan Target PD 1.....	66
Tabel IV.6 Sasaran, Indikator, dan Target PD2.....	67
Tabel IV.7 Sasaran, Indikator, dan Target PD3.....	68
Tabel IV.8 Sasaran, Indikator, dan Target PD4.....	69
Tabel IV.9 Sasaran, Indikator, dan Target PD 5.....	71
Tabel IV.10 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022.....	72
Tabel IV.11 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.....	73
Tabel VI.1 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022.....	416

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 IPM Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021	9
Gambar II.2 IPM Provinsi Kep. Riau dan Kabupaten/Kota di Prov. Kepri Tahun 2021	10
Gambar II.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021.....	11
Gambar II.4 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Prov. Kepri Tahun 2021.....	11
Gambar II.5 TPT Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 (%).....	12
Gambar II.6 TPT di Provinsi Kepri dan Kabupaten Kota di Provinsi Kepri (%)	12
Gambar II.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 (%)	13
Gambar II.8 LPE Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2021 (%).....	13
Gambar II.9 PDRB Per Kapita Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 (ribu rupiah/orang)	14
Gambar II.10 PDRB Per Kapita Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2021 (ribu rupiah/orang).....	14
Gambar II.11 Rasio Gini Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021	15
Gambar II.12 Rasio Gini di Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2021	15
Gambar IV.1 Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 ...	46
Gambar IV.2 Indikator dan Target Sasaran RKP 2022.....	58
Gambar IV.3 Perumusan tema dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan RKPD sebagai program pembangunan tahunan. Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang Kabupaten Bintan dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Bintan maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2022 telah disusun pada Tahun Anggaran 2021 melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 pada tanggal 9 Juli 2021 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 pada tanggal 30 Desember 2021.

Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD (P-RKPD) Tahun 2022. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa P-RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa P-RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

1.2 Tujuan

Tujuan Perubahan terhadap RKPD Tahun 2022 adalah, sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5499);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6302);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 60);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3036);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
38. **Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun ... Nomor ...);**
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 52).

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, Hasil Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2020, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.

Selain dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, perlu memperhatikan arahan dan kebijakan perencanaan lainnya yaitu Prioritas Pembangunan Nasional dan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: (1) Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal`s/SDGs*) dan (2) Rencana Aksi Nasional tentang Pangan dan Gizi dan (3) Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024 dan (4) Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

P-RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terdiri dari 6 (enam) bab secara ringkas sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Dua)

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VII Penutup

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II

Salah satu amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan adalah pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, bagian ini merupakan evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

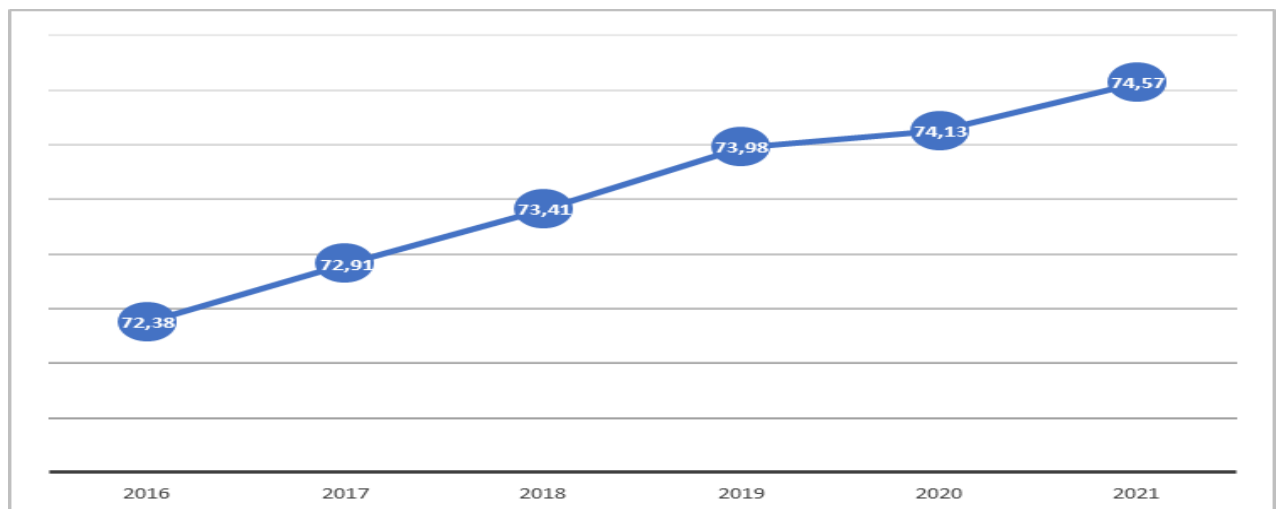
2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro, diukur dari keberhasilan capaian tujuan pembangunan yang berupa peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sekurang-kurangnya capaian kinerja memuat informasi tentang indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan.

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Terdapat tiga aspek yang menyusun nilai IPM, yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Berdasarkan publikasi BPS dalam Kabupaten Bintan Dalam Angka Tahun 2022, IPM Kabupaten Bintan adalah 74,57 atau meningkat sebesar 0,44 poin dibandingkan tahun 2021. IPM Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan, meskipun tidak terlalu signifikan. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Bintan pada angka 0,54%. Gambar II.1 menunjukkan nilai IPM tahun 2016-2021.

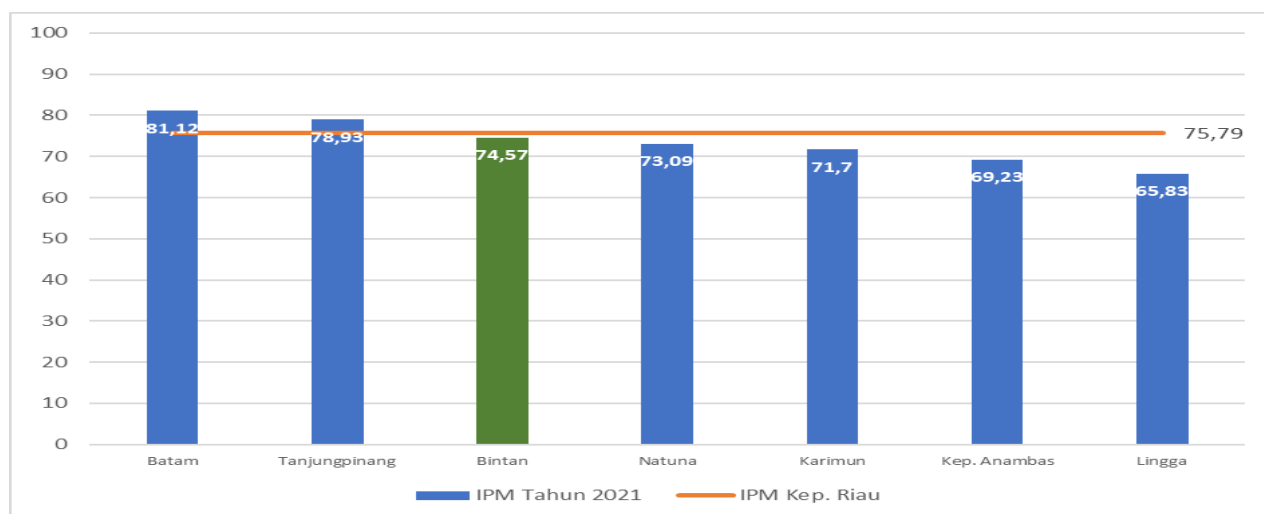
Gambar II.1 IPM Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2022

Di tingkat Provinsi Kepulauan Riau, secara keseluruhan nilai IPM mencapai nilai 75,79. IPM Kabupaten Bintan masih di bawah nilai IPM Provinsi Kepulauan Riau dan berada di posisi tiga besar di bawah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang yang secara berturut-turut memiliki nilai IPM tahun 2021 sebesar 81,12 dan 78,93. Selisih nilai IPM Kabupaten Bintan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan dua kota tersebut memiliki rentang yang cukup jauh, hal ini mengindikasikan Kabupaten Bintan tertinggal kualitas pembangunan manusianya dibandingkan dengan Kota Batam dan Tanjungpinang pada sektor pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Secara rinci Gambar II.2 menunjukkan perbedaan nilai IPM di antara kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar II.2 IPM Provinsi Kep. Riau dan Kabupaten/Kota di Prov. Kepri Tahun 2021

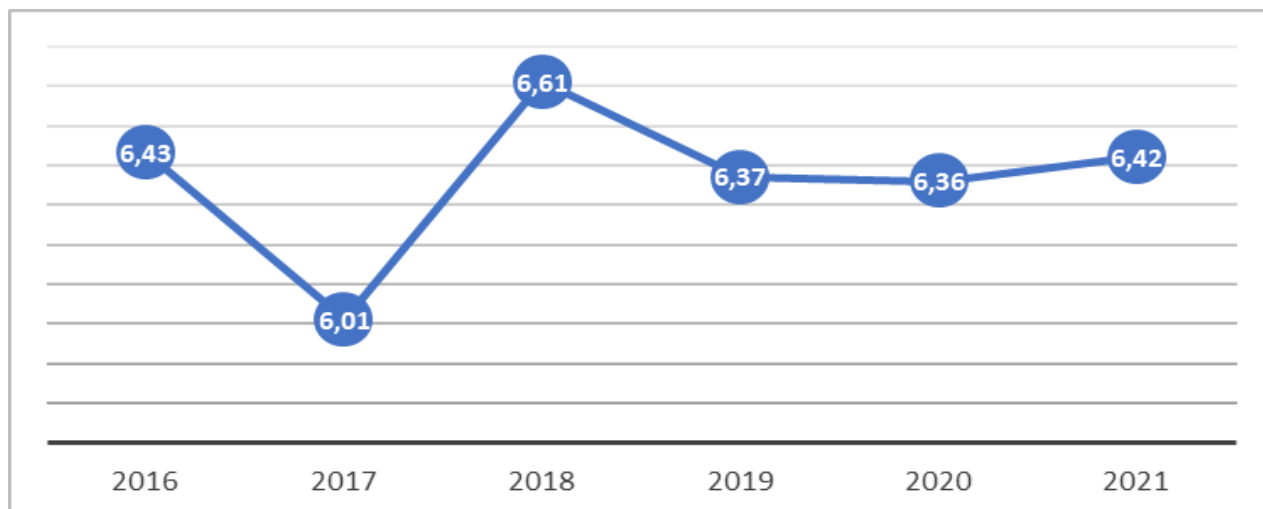


Sumber: BPS Prov. Kepri, 2022

2.1.2 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan nilai yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin di suatu daerah. BPS mendefinisikan miskin dengan pendekatan garis kemiskinan yang diperoleh dari perhitungan terhadap kebutuhan minimum seseorang pada kelompok makanan dan non makanan. Besarnya angka kemiskinan suatu daerah menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Angka kemiskinan di Kabupaten Bintan menunjukkan angka yang fluktuatif seperti terlihat pada Gambar II.3.

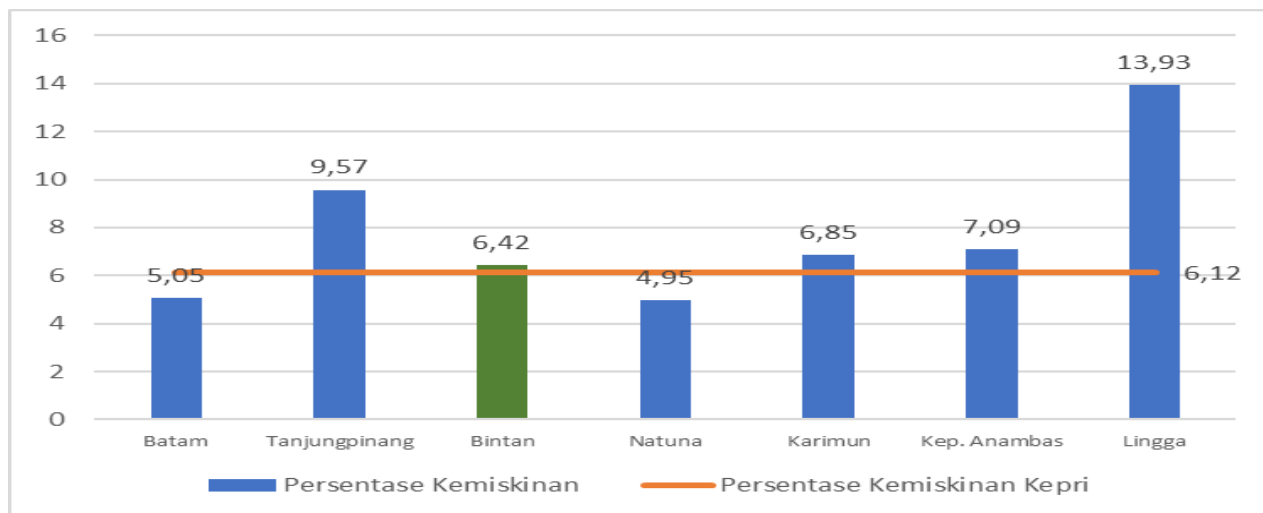
Gambar II.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kab. Bintan, 2022

Secara keseluruhan, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau. Di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepri, hanya Kota Batam dan Kabupaten Natuna yang memiliki persentase penduduk miskin lebih kecil dibandingkan dengan provinsi. Gambar II.4 di bawah menunjukkan persentase penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar II.4 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Prov. Kepri Tahun 2021

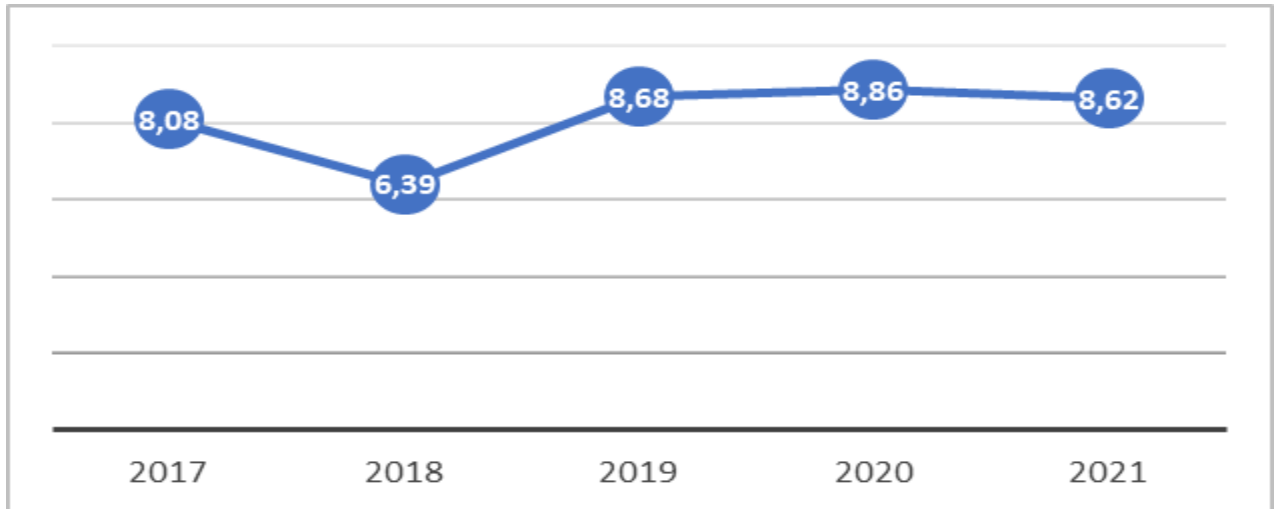


Sumber: BPS Prov. Kepri, 2022

2.1.3 Angka Pengangguran

BPS merujuk istilah tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai indikasi yang menunjukkan angka pengangguran yang berarti seluruh angkatan kerja yang tidak bekerja, namun secara aktif mencari pekerjaan. Pada tahun 2021, TPT menjadi lebih baik dengan nilai 8,62 dibandingkan tahun 2020 di angka 8,86. Perkembangan TPT 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar II.5.

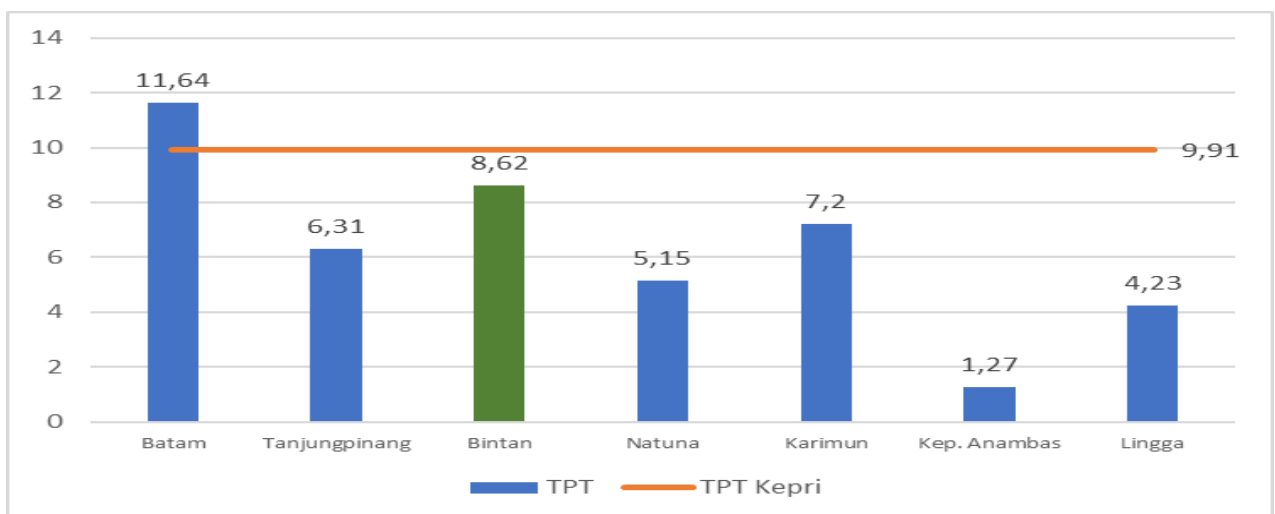
Gambar II.5 TPT Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2022

TPT Kabupaten Bintan termasuk yang paling besar di antara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepri, namun masih lebih rendah dibandingkan Kota Batam dan Provinsi Kepri. Hal ini berarti jumlah pengangguran di Kabupaten Bintan lebih besar dibandingkan kabupaten dan kota lain di Provinsi Kepri.

Gambar II.6 TPT di Provinsi Kepri dan Kabupaten Kota di Provinsi Kepri (%)

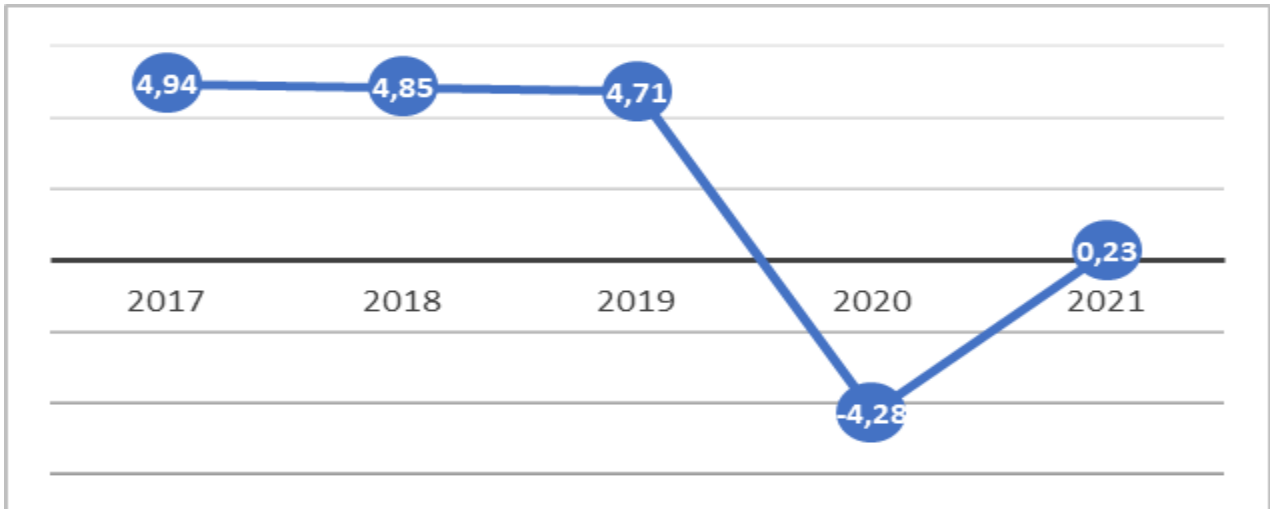


Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Selama 2017-2021 nilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan cenderung melambat yakni dari 4,94 persen pada tahun 2017 menjadi 4,51 persen pada tahun 2019 dan 0,23 persen pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 4,20 persen. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar II.7.

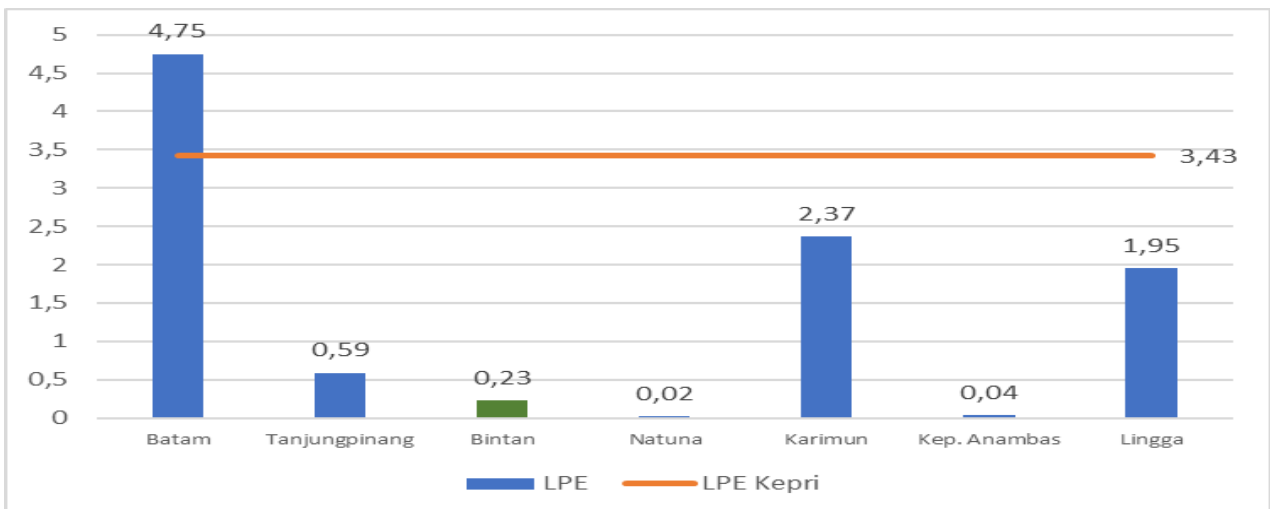
Gambar II.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2022

Kabupaten Bintan termasuk di antara kabupaten/kota yang memiliki kecepatan pulih lebih progresif jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Namun, secara nilai, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan belum mencapai 1% seperti halnya di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kep. Anambas.

Gambar II.8 LPE Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2021 (%)

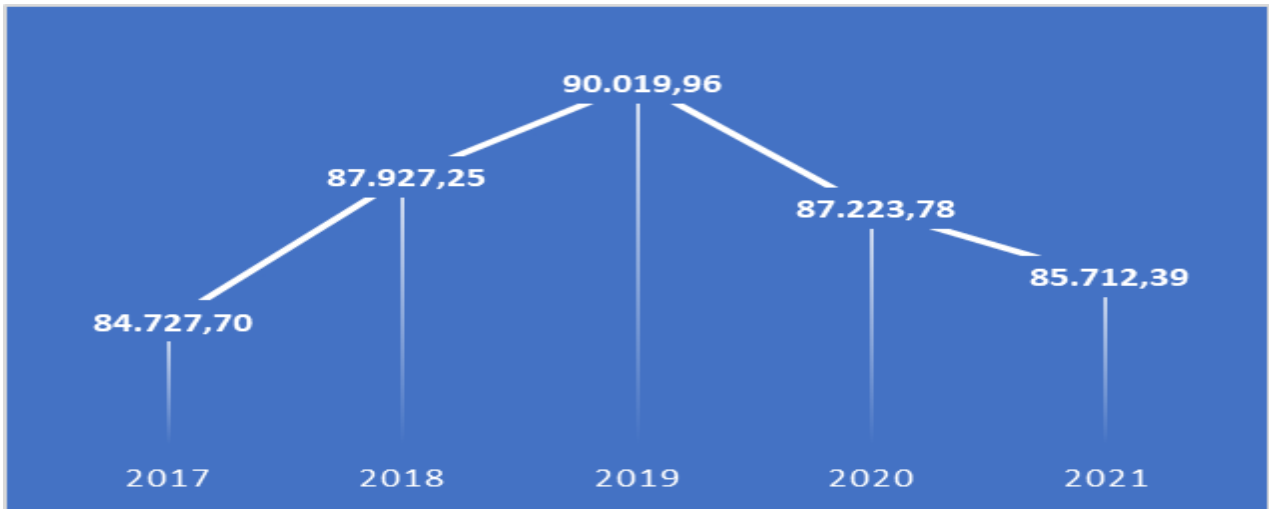


Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. Nilai yang ditampilkan pada Gambar II.9 merupakan PDRB ADHK Per Kapita. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bintan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Namun semenjak pandemi COVID-19, PDRB per kapita Kabupaten Bintan menjadi terus menurun sampai dengan tahun 2021.

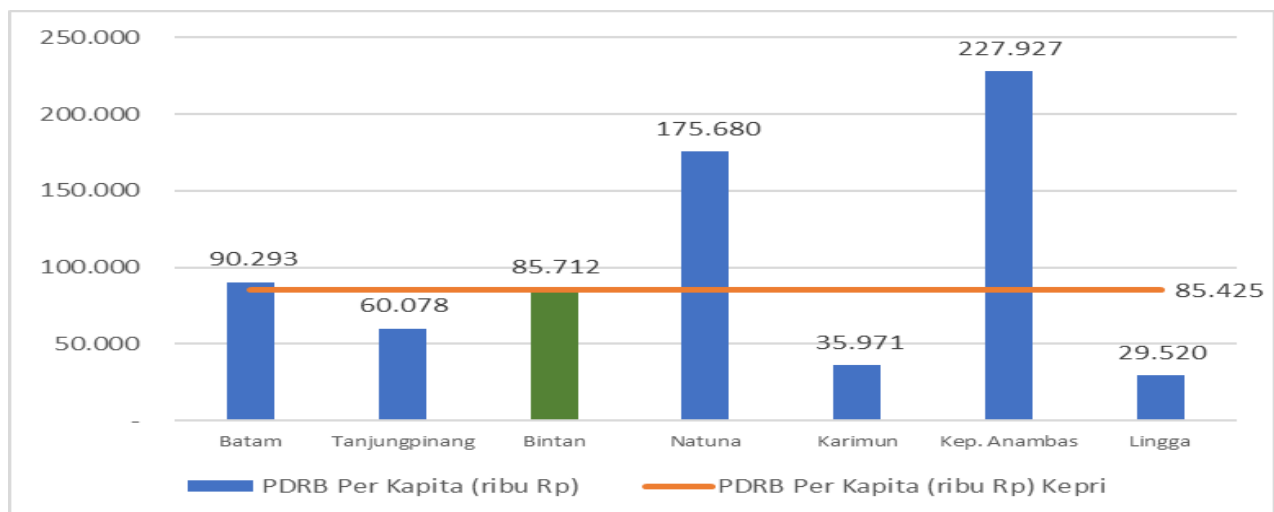
Gambar II.9 PDRB Per Kapita Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 (ribu rupiah/orang)



Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bintan lebih besar sedikit dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Kepri. Sedangkan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Bintan memiliki nilai PDRB per Kapita keempat terbesar setelah Kabupaten Kep. Anambas, Kabupaten Natuna dan Kota Batam. Perbandingan PDRB per kapita antara masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepri dapat dilihat pada Gambar II.10.

Gambar II.10 PDRB Per Kapita Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2021 (ribu rupiah/orang)



Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

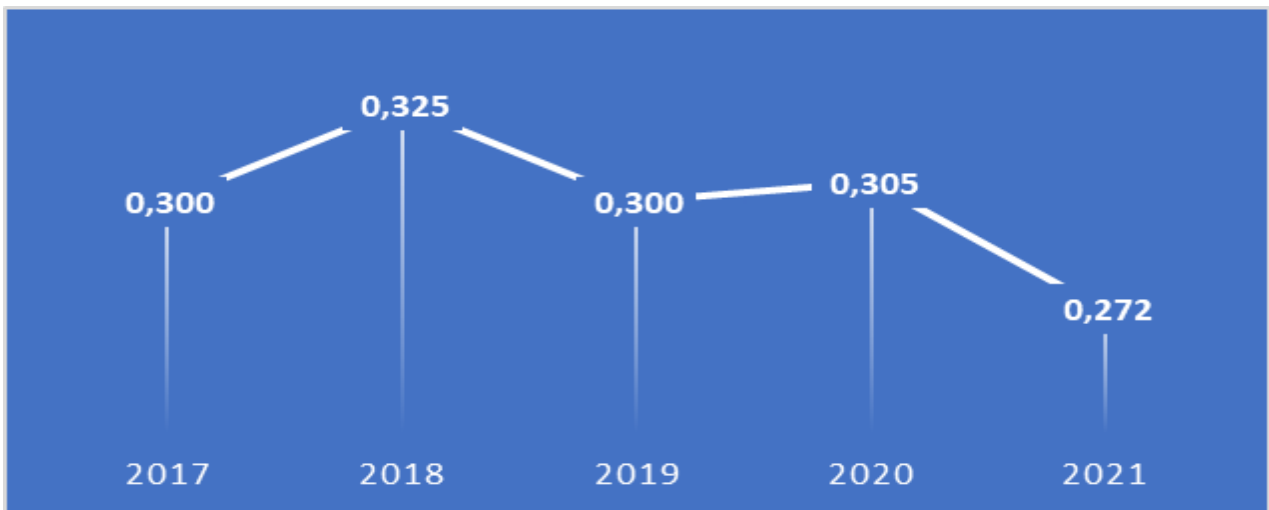
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Untuk merepresentasikan kejadian ketimpangan pendapatan, BPS menggunakan indikasi dengan menghitung nilai rasio gini. Kisaran rasio gini berada pada rentang nilai 0-1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya

sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Gambar II.15 menunjukkan nilai rasio gini Kabupaten Bintan di tahun 2021 pada angka 0,272 yang lebih merata pendapatannya dibandingkan tahun 2020.

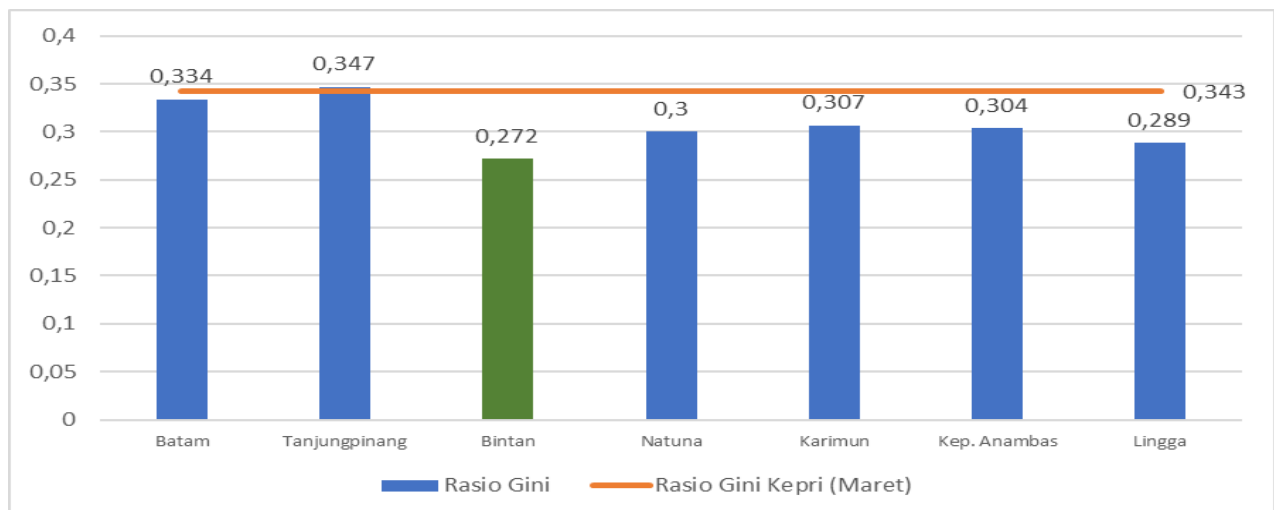
Gambar II.11 Rasio Gini Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

Gambar II.16 menunjukkan angka rasio gini di kabupaten/kota serta di Provinsi Kepulauan Riau. Secara nominal, di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, nilai rasio gini di Kabupaten Bintan merupakan yang paling rendah, sehingga dapat dikatakan pendapatan antara individu lebih merata di bandingkan dengan kabupaten/kota lain.

Gambar II.12 Rasio Gini di Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

2.2 Evaluasi Hasil Triwulan Dua Tahun 2022

2.2.1 Kinerja Fisik dan Keuangan Sub Kegiatan

Evaluasi hasil RKPD Triwulan Dua (TW II) Tahun 2022 merupakan hasil kompilasi dari realisasi kinerja dan anggaran seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bintan. Rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai bulan Juni di Perangkat Daerah yaitu 38,34% realisasi kinerja dengan kategori Sedang dan realisasi anggaran sebesar 27,63% dengan kategori Rendah. Berikut rekapitulasi hasil olah data evaluasi RKPD perangkat daerah triwulan II sampai dengan bulan Juni 2022.

Tabel II.1 Rekap Persentase Capaian Evaluasi Hasil RKPD TW II tahun 2022 Per Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran		Rata-rata Tingkat Capaian Renja / RKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja / RKPD	
		Anggaran dalam APBD (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.027.133.970	4.808.377.899,00	49,82	24,01	ST	R
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.682.954.433	2.333.578.081,00	50,02	34,92	ST	S
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	158.995.540.929	28.889.370.127,00	44,96	18,17	T	SR
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.865.011.652	3.659.300.533,00	51,21	37,09	ST	S
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	16.294.667.660	4.449.824.568,00	51,13	27,31	ST	R
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15.331.070.147	5.163.536.949,00	35,67	33,68	S	S
7	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.529.651.046	3.223.116.215,00	43,31	37,79	T	S
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	13.979.870.226	3.178.553.991,00	28,48	22,74	R	R
9	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	15.853.315.322	2.944.107.526,00	20,58	18,57	SR	SR
10	DINAS KESEHATAN	215.775.863.392	61.335.027.052,00	17,18	28,5	SR	R
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	14.758.467.976	5.449.467.391,00	36,27	36,92	S	S
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.597.664.031	4.070.235.810,00	56,86	35,1	ST	S

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran		Rata-rata Tingkat Capaian Renja / RKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja / RKPD	
		Anggaran dalam APBD (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
13	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	29.090.678.179	5.451.880.647,00	15,17	18,74	SR	SR
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.656.942.163	10.602.511.375,00	54,64	39,77	ST	T
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.539.366.436	13.351.618.044,00	37,58	13,41	S	SR
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.304.292.492	2.364.236.209,00	52,19	37,5	ST	S
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.725.476.739	2.435.318.350,00	35,08	22,71	S	R
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.019.892.117	3.093.864.681,00	53,96	38,58	ST	S
19	DINAS PENDIDIKAN	293.131.972.336	92.375.567.681,00	20,35	31,51	SR	S
20	DINAS PERHUBUNGAN	11.442.504.139	3.729.468.055,00	34,95	32,59	S	S
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	21.714.771.070	4.378.834.148,00	48,16	20,17	ST	SR
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	5.173.672.187	1.994.381.141,00	41,76	38,55	T	S
23	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	48.888.688.464	7.084.547.502,00	23,68	14,49	R	SR
24	DINAS SOSIAL	14.233.513.060	5.084.664.165,00	60,62	35,72	ST	S
25	DINAS TENAGA KERJA	5.537.551.484	1.488.549.796,00	28,33	26,88	R	R
26	INSPEKTORAT DAERAH	11.943.623.605	4.333.822.809,00	47,99	36,29	ST	S
27	KECAMATAN BINTAN PESISIR	3.522.149.127	1.257.067.865,00	45,9	35,69	T	S
28	KECAMATAN BINTAN TIMUR	13.052.574.441	2.192.512.229,00	23,46	16,8	R	SR
29	KECAMATAN BINTAN UTARA	10.902.984.601	3.318.140.707,00	15,42	30,43	SR	R
30	KECAMATAN GUNUNG KIJANG	6.517.214.462	2.042.236.922,00	50,21	31,34	ST	S
31	KECAMATAN MANTANG	3.651.527.254	1.611.130.079,00	50,84	44,12	ST	T
32	KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	7.446.659.222	2.349.854.995,00	29,64	31,56	R	S
33	KECAMATAN TAMBELAN	4.831.317.081	1.529.068.504,00	31,06	31,65	R	S
34	KECAMATAN TELUK BINTAN	5.751.639.433	1.908.358.421,00	37,78	33,18	S	S

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran		Rata-rata Tingkat Capaian Renja / RKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja / RKPD	
		Anggaran dalam APBD (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
35	KECAMATAN TELUK SEBONG	6.119.819.369	1.986.796.910,00	22,73	32,46	R	SR
36	KECAMATAN TOAPAYA	5.913.084.433	2.330.667.689,00	45,53	39,42	T	T
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	19.123.885.714	7.858.637.463,00	31,3	41,09	S	T
38	SEKRETARIAT DAERAH	66.998.138.223	24.416.537.192,00	34,33	36,44	S	S
39	SEKRETARIAT DPRD	44.359.865.904	18.653.664.126,00	39,49	42,05	T	T
JUMLAH		1.298.285.014.519	358.728.433.847,00	38,34	27,63	S	R

Berikut rincian hasil evaluasi RKPD perangkat daerah TW Tahun 2022.

2.2.1.1 Bidang Pendidikan

Capaian kinerja Bidang Pendidikan pada Triwulan II tahun 2022 memiliki kinerja yang Sangat Rendah yaitu sebesar 20,35% dengan penyerapan anggaran Sedang yaitu sebesar 31,51%.

Tabel II.2 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pendidikan

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35,79	38,78	S	S
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	10,90	13,99	SR	SR
3.	Program Pengembangan Kurikulum	0	0	SR	SR
Rata-rata		20,35	31,51	SR	S

2.2.1.2 Bidang Kesehatan

Capaian kinerja Bidang Kesehatan pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Rendah yaitu sebesar 17,18% dengan realisasi anggaran yang Rendah sebesar 28,5%.

Tabel II.3 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kesehatan

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31,9	41,18	S	T
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	17,26	9,55	SR	SR
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	20,79	17,4	SR	SR
4.	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	6,46	0,77	SR	SR
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	14,34	21,66	SR	SR
Rata-rata		17,18	28,5	SR	R

2.2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Rendah yaitu sebesar 30,39% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah sebesar 14,97%.

Tabel II.4 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46,84	36,76	T	S
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	26,47	7,69	R	SR
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	23	5,25	R	SR
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	62,52	13,86	ST	SR
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	23,24	4,22	R	SR
6.	Program Penyelenggaraan Jalan	34,76	25,51	S	R
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	13,75	14,11	SR	SR
8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	12,5	12,39	SR	SR
	Rata-rata	30,39	14,97	R	SR

2.2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Rendah yaitu sebesar 23,68% yaitu sebesar 26,57% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah sebesar 14,49%.

Tabel II.5 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31,27	42,26	S	S
2.	Program Pengembangan Perumahan	21,05	11,22	SR	SR
3.	Program Kawasan Permukiman	5	10,3	SR	SR
4.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	4,17	0,66	SR	SR
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	11,76	1,58	SR	SR
6.	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3,33	3,26	SR	SR
	Rata-rata	23,68	14,49	R	SR

2.2.1.5 Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Tinggi yaitu sebesar 41,26% dengan penyerapan anggaran Tinggi sebesar 39,09%.

Tabel II.6 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40,38	40,26	T	T
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	23,33	51,82	R	ST
	BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54,33	37,63	ST	S
2.	Program Penanggulangan Bencana	29,44	21,37	R	SR
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	37,81	51,05	S	ST
	Rata-rata	41,26	39,09	T	T

2.2.1.6 Bidang Sosial

Capaian kinerja Bidang Sosial pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Tinggi yaitu sebesar 60,62% dengan penyerapan anggaran Sedang sebesar 35,72%.

Tabel II.7 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Sosial

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58,2	37,64	ST	S
2.	Program Pemberdayaan Sosial	45,3	42,93	T	T
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	66,65	49,13	ST	ST
4.	Program Rehabilitasi Sosial	68,41	52,95	ST	ST
5.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	67,66	29,79	ST	R
6.	Program Penanganan Bencana	66,82	41,69	ST	T
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	32,5	0	S	SR
	Rata-Rata	60,62	35,72	ST	S

2.2.1.7 Bidang Tenaga Kerja

Capaian kinerja Bidang Tenaga Kerja pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Rendah yaitu sebesar 28,33% dengan realisasi anggaran Rendah sebesar 26,88%.

Tabel II.8 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Tenaga Kerja

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37,14	37,39	S	S
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	0	0	SR	SR
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	0	0	SR	SR
4.	Program Hubungan Industrial	19,03	12,95	SR	SR
	Rata-rata	28,33	26,88	R	R

2.2.1.8 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sedang yaitu sebesar 37,77% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah sebesar 14,63%.

Tabel II.9 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52,11	39,74	ST	T
2.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	3,1	2,99	SR	SR
3.	Program Perlindungan Perempuan	48,5	9,14	ST	SR
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	14,73	6,43	SR	SR
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	27,86	7,12	R	SR
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	45,67	10,73	T	SR
	Rata-rata	37,77	14,63	S	SR

2.2.1.9 Bidang Pangan

Capaian kinerja Bidang Pangan pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sedang yaitu sebesar 37% dengan realisasi anggaran Sedang sebesar 36,66%.

Tabel II.10 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pangan

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51,65	44,52	ST	T
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	0	0	SR	SR
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	29,35	27,07	R	R
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	67	75,06	ST	ST
	Rata-rata	37,00	36,66	S	S

2.2.1.10 Bidang Pertanian

Capaian kinerja Bidang Pertanian pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Rendah yaitu sebesar 8,89% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 0,23%.

Tabel II.11 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pertanian

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	8,89	0,23	SR	SR
	Rata-rata	8,89	0,23	SR	SR

2.2.1.11 Bidang Lingkungan Hidup

Capaian kinerja Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Tinggi yaitu sebesar 54,64% dengan realisasi anggaran Tinggi sebesar 39,77%.

Tabel II.12 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,95	40,57	ST	T
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	71,16	20	ST	SR
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	53,22	43,81	ST	T
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	56	35,56	ST	S
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	36,67	8,12	S	SR
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	11,75	3,09	SR	SR
7.	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	62,5	62,09	ST	ST
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	45	28,18	T	R
9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20	13,24	SR	SR
10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	56,67	18,3	ST	SR
11.	Program Pengelolaan Persampahan	54,62	40,58	ST	T
	Rata-rata	54,64	39,77	ST	T

2.2.1.12 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Tinggi yaitu sebesar 43,31% dengan realisasi anggaran Sedang sebesar 37,79%.

Tabel II.13 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,66	38,14	SST	S
2.	Program Pendaftaran Penduduk	15,6	18,2	SR	SR
3.	Program Pencatatan Sipil	12	15,32	SR	SR
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	34,27	42,42	S	T
	Rata-rata	43,31	37,79	T	S

2.2.1.13 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Tinggi yaitu sebesar 52,19% dengan realisasi anggaran Sedang sebesar 37,5%.

Tabel II.14 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	69,62	39,88	ST	T
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	49,33	16,79	ST	SR
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	22,39	16,61	R	SR
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	66,22	50,77	ST	ST
	Rata-rata	52,19	37,5	ST	S

2.2.1.14 Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Rendah yaitu sebesar 30,60% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah sebesar 9,36%.

Tabel II.15 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Pengendalian Penduduk	57,5	14,65	ST	SR
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	27,71	1,75	R	SR
3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6,6	11,67	SR	SR
	Rata-rata	30,60	9,36	R	SR

2.2.1.15 Bidang Perhubungan

Capaian kinerja Bidang Perhubungan pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sedang yaitu sebesar 34,95% dengan realisasi anggaran Sedang sebesar 32,59%.

Tabel II.16 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perhubungan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45,85	39,36	T	T
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	25,32	37,07	R	S
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	19,12	6	SR	SR
	Rata-rata	34,95	32,59	S	S

2.2.1.16 Bidang Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Tinggi yaitu sebesar 54,28% dengan realisasi anggaran Tinggi sebesar 43,07%.

Tabel II.17 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59,85	30,67	ST	R
2.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	48,24	55,41	ST	ST
3.	Program Aplikasi Informatika	54,75	43,14	ST	T
	Rata-rata	54,28	43,07	ST	T

2.2.1.17 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Rendah yaitu sebesar 12,48% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 12,02%.

Tabel II.18 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,27	38,41	R	S
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	SR	SR
3.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	29,74	5,86	R	SR
4.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	10	15	SR	SR
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	7,86	12,87	SR	SR
6.	Program Pengembangan Umkm	0	0	SR	SR
	Rata-rata	12,48	12,02	SR	SR

2.2.1.18 Bidang Penanaman Modal

Capaian kinerja Bidang Penanaman Modal pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Tinggi yaitu sebesar 53,96% dengan realisasi anggaran Sedang sebesar 38,58%.

Tabel II.19 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Penanaman Modal

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60,61	42,81	ST	T
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	34	1,23	S	SR
3.	Program Promosi Penanaman Modal	0	0	SR	SR
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	45,25	16,85	T	SR
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	49,22	19,23	ST	SR
	Rata-rata	53,96	38,58	ST	S

2.2.1.19 Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sangat Rendah yaitu sebesar 20,58% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 18,57%.

Tabel II.20 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30,78	37,3	R	S
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	9,69	0,98	SR	SR
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	0,88	9,17	SR	SR
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	8,33	38,86	SR	T
	Rata-rata	20,58	18,57	SR	SR

2.2.1.20 Bidang Statistika

Capaian kinerja Bidang Statistik pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Rendah yaitu sebesar 0% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 0%.

Tabel II.21 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Statistika

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	0	0	SR	SR
	Rata-rata	0	0	SR	SR

2.2.1.21 Bidang Persandian

Capaian kinerja Bidang Persandian pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sangat Tinggi yaitu sebesar 50% dengan realisasi anggaran Rendah sebesar 23,4%.

Tabel II.22 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Persandian

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	50	23,4	ST	R
	Rata-rata	50	23,4	ST	R

2.2.1.22 Bidang Kebudayaan

Capaian kinerja Bidang Kebudayaan pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sangat Rendah yaitu sebesar 20,57% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 17,54%.

Tabel II.23 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kebudayaan

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38,81	38,34	T	S
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	7,04	4,31	SR	SR
3.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	15	8,05	SR	SR
4.	Program Pengelolaan Permuseuman	21,43	19,44	SR	SR
	Rata-rata	20,57	17,54	SR	SR

2.2.1.23 Bidang Perpustakaan

Capaian kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Rendah yaitu sebesar 20,58% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 18,57%.

Tabel II.24 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perpustakaan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46,47	39,29	T	T
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	18,59	12,92	SR	SR
	Rata-rata	32,53	26,11	S	R

2.2.1.24 Bidang Arsip

Capaian kinerja Bidang Kearsipan pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sangat Rendah yaitu sebesar 20,57% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 21,5%.

Tabel II.25 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Arsip

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Pengelolaan Arsip	20,57	21,5	SR	SR
	Rata-rata	20,57	21,5	SR	SR

2.2.1.25 Bidang Perikanan dan Kelautan

Capaian kinerja Bidang Perikanan pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Tinggi yaitu sebesar 48,16% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 20,17%.

Tabel II.26 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perikanan dan Kelautan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51,34	41,14	ST	T
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24,78	2,77	R	SR

3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	22,5	4,18	SR	SR
4.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	16,39	7,4	SR	SR
	Rata-rata	48,16	20,17	ST	SR

2.2.1.26 Bidang Pertanian

Capaian kinerja Bidang Pertanian pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sangat Rendah yaitu sebesar 17,81% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 16,89%.

Tabel II.27 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pertanian

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	22,41	9,7	SR	SR
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5,06	0,81	SR	SR
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	36,96	42,36	S	T
4.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	21,06	10,06	SR	SR
5.	Program Penyuluhan Pertanian	3,57	21,52	SR	SR
	Rata-rata	17,81	16,89	SR	SR

2.2.1.27 Bidang Pariwisata

Capaian kinerja Bidang Pariwisata pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Rendah yaitu sebesar 17,22% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 4,85%.

Tabel II.28 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pariwisata

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	50,43	8,68	ST	SR
2.	Program Pemasaran Pariwisata	9,47	3,76	SR	SR
3.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	0	0	SR	SR
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	8,97	6,97	SR	SR
	Rata-rata	17,22	4,85	SR	SR

2.2.1.28 Bidang Perdagangan

Capaian kinerja Bidang Perdagangan pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sangat Rendah yaitu sebesar 18,75% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 16,46%.

Tabel II.29 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perdagangan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	SR	SR
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	0	0	SR	SR
3.	Program Pengembangan Ekspor	0	0	SR	SR
4.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	75	65,83	ST	ST
	Rata-rata	18,75	16,46	SR	SR

2.2.1.29 Bidang Perindustrian

Capaian kinerja Bidang Perindustrian pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sangat Rendah yaitu sebesar 5,54% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 6,90%.

Tabel II.30 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perindustrian

No.	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	11,07	13,8	SR	SR
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	0	0	SR	SR
	Rata-rata	5,54	6,90	SR	SR

2.2.1.30 Bidang Sekretariat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Rendah yaitu sebesar 28,48% dengan realisasi anggaran Sedang sebesar 37,81%.

Tabel II.31 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37,74	38,63	S	S
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	21,61	32,26	SR	S
3.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	26,08	42,53	S	T
	Rata-rata	28,48	37,81	R	S

2.2.1.31 Bidang Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Tinggi yaitu sebesar 39,49% dengan realisasi anggaran Tinggi sebesar 42,05%.

Tabel II.32 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	47,44	48,38	T	ST

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
	Daerah Kabupaten/Kota				
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	31,96	32,04	S	S
	Rata-rata	39,49	42,05	T	T

2.2.1.32 Bidang Perencanaan

Capaian kinerja Bidang Perencanaan pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Tinggi yaitu sebesar 46,21% dengan realisasi anggaran Rendah sebesar 31,14%.

Tabel II.33 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Perencanaan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40,15	37,99	T	S
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	75,14	44,7	ST	T
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	23,33	10,73	R	SR
	Rata-rata	46,21	31,14	T	R

2.2.1.33 Keuangan

Capaian kinerja Bidang Keuangan pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sangat Tinggi yaitu sebesar 48,05% dengan realisasi anggaran Rendah sebesar 22,74%.

Tabel II.34 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Keuangan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48,74	30,27	ST	R
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	45,89	15,82	T	SR
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	41,07	9,56	T	SR
	Badan Pendapatan Daerah				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41,42	28,83	T	R
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	52,5	18,42	ST	SR
	Rata-rata	48,05	22,74	ST	R

2.2.1.34 Kepegawaian

Capaian kinerja Bidang Kepegawaian pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Tinggi yaitu sebesar 49,74% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 21,52%.

Tabel II.35 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kepegawaian

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49,98	22,61	ST	R
2.	Program Kepegawaian Daerah	49,5	20,43	ST	SR
	Rata-rata	49,74	21,52	ST	SR

2.2.1.35 Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja Bidang Pendidikan dan Pealtihan pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sangat Tinggi yaitu sebesar 50% dengan realisasi anggaran Sedang sebesar 36,25%.

Tabel II.36 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	50	36,25	ST	S
	Rata-rata	50	36,25	ST	S

2.2.1.36 Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sangat Rendah yaitu sebesar 6,69% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah sebesar 5,16%.

Tabel II.37 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	6,69	5,16	SR	SR
	Rata-rata	6,69	5,16	SR	SR

2.2.1.37 Pengelolaan Perbatasan

Capaian kinerja Bidang Pengelola Perbatasan Daerah pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sangat Tinggi yaitu sebesar 56,67% dengan realisasi anggaran Tinggi sebesar 42,26%.

Tabel II.38 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pengelolaan Perbatasan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Pengelolaan Perbatasan	56,67	42,26	ST	T
	Rata-rata	56,67	42,26	ST	T

2.2.1.38 Pengawasan

Capaian kinerja Bidang Pengawasan pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Sangat Tinggi yaitu sebesar 47,99% dengan realisasi anggaran Sedang sebesar 36,29%.

Tabel II.39 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Pengawasan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,23	38,06	ST	S
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	56,26	24,6	ST	R
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	31,92	31,64	S	S
	Rata-rata	47,99	36,29	ST	S

2.2.1.39 Kecamatan

Capaian kinerja Bidang Kewilayah pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Rendah yaitu sebesar 29,12% dengan realisasi anggaran Rendah sebesar 24,68%.

Tabel II.40 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kewilayah

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37,90	35,10	S	S
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	35,69	32,07	S	S
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	41,21	26,16	T	R
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	19,17	12,71	SR	SR
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	SR	SR
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40,77	42,05	T	T
	Rata-rata	29,12	24,68	R	R

2.2.1.40 Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik pada tahun 2022 TW II memiliki kinerja Sangat Tinggi yaitu sebesar 50,02% dengan realisasi anggaran Sedang sebesar 34,92%.

Tabel II.41 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	% Realisasi		Status	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52,23	40,12	ST	T
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	67,6	22,62	ST	R
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	86,25	21,03	ST	SR
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	21,88	0,95	SR	SR
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	44	0,96	T	SR
	Rata-rata	50,02	34,92	ST	S

2.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut

2.3.1 Permasalahan

Secara keseluruhan dari 3 (tiga) Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bintan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 ini, terdapat beberapa permasalahan umum yaitu :

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penganggaran pembangunan yang menginstruksikan agar Pemerintah Daerah fokus penanganan masalah pandemi COVID-19 maka Pemerintah di daerah diharapkan menindak lanjuti fokus penanganan masalah pandemi ini sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antara lain efisiensi dan *refocusing* pelaksanaan APBD Tahun 2022 demikian pula juga berdampak pada anggaran yang ditransfer ke daerah mengalami keterlambatan;
2. Adanya perubahan Petunjuk Teknis (Juknis) maupun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan DAK Tahun 2022, sehingga OPD mengalami hambatan dalam percepatan penyaluran anggaran dari Pemerintah Pusat, pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun penyelesaian dilapangan.
3. Masih lambatnya penyerapan anggaran oleh OPD disebabkan masih adanya rasionalisasi dan pergeseran anggaran sehingga sebagian besar kegiatan pembangunan baru mulai dilaksanakan pada bulan ke tiga Triwulan 1 Tahun 2022 dengan pelaksanaan yang relatif lambat mengakibatkan capaian kinerja sangat rendah.
4. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Gerbang Kampung ditingkat kelurahan dikarenakan masih belum siapnya Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
5. Adanya migrasi sistem dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Financial Management Information System (FMIS) berpotensi mempengaruhi kelancaran penatausahaan keuangan.
6. Belum terwujudnya integrasi sistem secara penuh antara aplikasi sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan maupun pengendalian serta pelaporan kegiatan pembangunan serta masih terjadinya *updating* pada aplikasi SIPD yang berkelanjutan tentunya berdampak terhadap adaptasi user didaerah.

7. Masih ada OPD yang lambat mengentri progres pelaksanaan kegiatan/ menyampaikan laporannya ke BAPELITBANG KABUPATEN BINTAN.

2.3.2 Tindak Lanjut

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan menindaklanjuti kebijakan pusat ini dengan melakukan efisiensi anggaran APBD Tahun 2022.
2. Melakukan pengendalian pada saat penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan APBD, sehingga tidak ada alasan lagi waktu yang kurang dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sampai akhir RKPD
3. Seluruh kepala OPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA OPD tahun 2022, serta langkah antisipasinya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan OPD secara intensif, baik dilakukan melalui rapat *offline* maupun *online* dengan memperhatikan *deadline* waktu, khususnya kegiatan bersumber DAK yang sangat ketat dengan waktu.
4. Regulasi yang diperlukan dalam suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan hendaknya dikoordinasikan dengan baik oleh pihak-pihak terkait sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan.
5. Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing OPD diharapkan menjadi acuan tindak lanjut dalam pelaksanaan triwulan selanjutnya, sehingga SILPA tahun 2022 tidak terlalu besar.
6. Aplikasi SIMONEV saat ini digunakan sebagai aplikasi pelaporan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Bintan. Kedepan diharapkan pemerintah dalam hal ini Kemendagri, terus mengembangkan SIPD sampai kepada menu pelaporan sehingga terwujud sistem yang terintegrasi antara perencanaan dan perencanaan dan pengelolaan keuangan maupun pengendalian serta pelaporan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif.
7. Perlunya regulasi yang mengatur standar waktu pelaporan dan evaluasi, sehingga dapat dihasilkan laporan yang tepat waktu dan akurat.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1 Perubahan Arah Kebijakan Perekonomian Nasional

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut meski berisiko lebih rendah dari proyeksi sebelumnya seiring meningkatnya risiko ketidakpastian global yang meningkat sejalan belum berakhirnya perang Rusia-Ukraina. Meningkatnya risiko ketidakpastian global tersebut kemudian berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya risiko inflasi di banyak negara terutama melalui jalur perdagangan dan keuangan. Peningkatan inflasi di banyak negara telah mendorong otoritas moneter setempat untuk mempercepat normalisasi kebijakan moneter salah satunya melalui penyesuaian suku bunga acuan termasuk di Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga *Fed Fund Rate*.

Lembaga International Monetary Fund (IMF) dalam outlook terbaru yang dirilis pada April 2022 merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 menjadi 3,6% (yoy), lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,4% (yoy). Sementara pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diprediksi stabil sebesar 3,6% (yoy). Penurunan proyeksi ekonomi tersebut turut dipicu oleh masih berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, peningkatan kasus COVID-19 di Tiongkok yang mendorong pemerintah setempat melakukan *lockdown* sehingga akan mengganggu aktivitas perdagangan. Di sisi lain kenaikan harga komoditas baik pangan maupun energi serta ketidakpastian di pasar keuangan global terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan India diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Ketidakpastian global tersebut juga telah memicu disrupsi dalam rantai pasok terutama pada komoditas energi dan semikonduktor sejak tahun lalu. Gangguan global supply chain diperkirakan berangsur membaik pada tahun 2022, namun harga komoditas energi diperkirakan masih akan meningkat.

Realisasi pertumbuhan ekonomi beberapa negara pada triwulan I 2022 secara umum menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan triwulan IV 2021,

walaupun di beberapa negara mengalami peningkatan pertumbuhan seperti Tiongkok dan Uni Eropa. Perlambatan ekonomi Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, Hongkong dan Vietnam terjadi seiring munculnya varian Omicron COVID-19 yang diperparah oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kondisi ini memicu kenaikan level inflasi di berbagai negara, serta menahan laju pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung.

Secara keseluruhan tahun pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 diperkirakan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2021 yang juga disebabkan oleh faktor *base effect* sehingga secara perlahan tingkat pertumbuhan tahun ini akan kembali ke level alamiahnya pada masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, gelombang baru pandemi COVID-19 dari munculnya varian omicron di beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat sejak awal tahun 2022 serta konflik Rusia-Ukraina telah membuat prakiraan pertumbuhan dikoreksi lebih rendah. Namun demikian Bank Indonesia masih optimis pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 akan berada pada kisaran 4,5% s/d 5,3%.

Salah satu faktor pendukung perbaikan ekonomi domestik pada tahun 2022 yakni semakin membaiknya mobilitas masyarakat seiring terkendalinya penyebaran COVID-19 serta berlanjutnya program vaksinasi. Secara umum perbaikan ekonomi domestik akan didorong oleh meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat sehingga akan mendorong konsumsi rumah tangga untuk tumbuh positif. Demikian halnya, konsumsi pemerintah yang diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan penerimaan negara di tengah kondisi perekonomian yang terus meningkat.

3.1.1.2 Prospek Inflasi

Inflasi pada triwulan II 2022 diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan harga komoditas global khususnya pangan, energi, dan logam yang dapat meningkatkan tekanan inflasi pada komoditas lainnya. Di sisi lain keberhasilan pengendalian penyebaran COVID-19 varian Omicron yang diikuti dengan kebijakan pelonggaran mobilitas ekonomi serta periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) juga telah mendorong peningkatan permintaan masyarakat. Kondisi tersebut telah mendorong terjadinya peningkatan tekanan inflasi yang terjadi pada seluruh komponen baik *volatile food*, *administered prices*, maupun inflasi inti.

Peningkatan inflasi kelompok inti didorong oleh permintaan domestik yang semakin membaik seiring kebijakan pelonggaran mobilitas masyarakat dan periode HBKN serta transmisi inflasi komoditas global yang terus berlanjut. Selain itu, peningkatan harga emas global diperkirakan terus berlanjut seiring kenaikan permintaan akibat meningkatnya ketidakpastian global didorong faktor geopolitik Rusia dan Ukraina. Di sisi lain, peningkatan inflasi kelompok *volatile food* dipengaruhi oleh kenaikan permintaan seiring dengan pelonggaran mobilitas dan momen HBKN. Pencabutan HET untuk minyak goreng kemasan, peningkatan biaya produksi pakan ternak dan kondisi cuaca (panas berlebihan) di beberapa daerah juga turut meningkatkan tekanan inflasi pada triwulan II.

Sementara itu peningkatan inflasi kelompok *administered prices* dipengaruhi oleh peningkatan harga bensin, avtur, harga LPG dan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) seiring penyesuaian harga BBM non subsidi. Peningkatan permintaan jasa angkutan udara pada momen Ramadhan dan Idul Fitri serta kenaikan *fuel surcharge* dari maskapai juga mendorong kenaikan tarif angkutan udara pada triwulan II 2022.

Peningkatan inflasi AP juga didorong oleh inflasi rokok kretek filter seiring berlanjutnya transmisi kenaikan cukai tembakau.

3.1.2 Arahan Kebijakan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Perekonomian Kepri secara keseluruhan tahun 2022 juga diperkirakan mengalami peningkatan yang didorong oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas pelaku usaha seiring dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun ini diperkirakan akan ditopang oleh komponen investasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah dan peningkatan investasi. Kinerja ekspor juga diperkirakan masuk baik ditopang oleh ekspor migas dari Kepri. Dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bansos diharapkan akan turut menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan ekonomi diprakirakan didorong oleh kinerja LU utama di Kepri. Kinerja LU perdagangan diperkirakan tumbuh membaik sejalan dengan perbaikan daya beli dan konsumsi masyarakat. Demikian halnya dengan lapangan usaha terkait dengan pariwisata lainnya,

seperti transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa hiburan yang diperkirakan mengalami perbaikan setelah Pemerintah memutuskan untuk membuka perbatasan (melonggarkan syarat perjalanan) bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia melalui Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Di sisi lain, kinerja LU konstruksi juga diperkirakan dapat tumbuh menguat pada tahun 2022 sejalan dengan realisasi proyek infrastruktur pemerintah maupun swasta yang masih terus berjalan yang sebelumnya tertunda pada tahun 2021.

Dari sisi eksternal, semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di berbagai negara dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi akan mendorong mobilitas secara global dan permintaan ekspor dari negara mitra utama terhadap Provinsi Kepri. Investasi oleh Pemerintah maupun pihak swasta juga diperkirakan meningkat yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kepri. Pengajuan rencana investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di Provinsi Kepri seperti KEK Kesehatan Sekupang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri. Di sisi lain, rencana pengembangan energi hijau dan terbarukan dengan memanfaatkan permukaan waduk Tembesi dan waduk Duriangkang. Hasil liaison Bank Indonesia menunjukkan bahwa realisasi investasi swasta pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dibanding tahun 2021. Berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah dan beberapa proyek apartemen, hotel dan resort di kawasan pariwisata akan menjadi mendorong meningkatnya investasi bangunan. Sementara itu, investasi non bangunan akan bersumber dari sektor swasta pada industri manufaktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi.

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 diperkirakan masih melanjutkan tren pemulihan seiring dengan mobilitas masyarakat yang meningkat didukung oleh semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 dan pembukaan sektor pariwisata. Peningkatan konsumsi juga didorong oleh berlanjutnya stimulus pemerintah melalui bansos dan kartu pra kerja untuk menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, inflasi diperkirakan masih terkendali sehingga akan turut berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong konsumsi rumah tangga. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia hingga triwulan I 2022 menunjukkan adanya tren kenaikan optimisme masyarakat. Namun demikian, peningkatan harga komoditas pangan global serta kemunculan varian baru COVID-19 tetap perlu diwaspadai.

Peningkatan konsumsi rumah tangga tercermin dari optimisme peningkatan penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Optimisme tersebut terindikasi dari Indeks Penghasilan Konsumen dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang menunjukkan peningkatan. Berlanjutnya program bantuan sosial (Bansos) akan turut menopang daya beli dari kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Konsumsi pemerintah juga diperkirakan dapat tumbuh meningkat didorong oleh realisasi belanja modal dan proyek yang tertunda pada tahun lalu. Dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan nasional terkini serta perkembangan kasus COVID-19 yang semakin terkendali, perekonomian Kepri pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh menguat dari tahun lalu. Secara keseluruhan perekonomian Kepri pada tahun 2022 akan tumbuh pada kisaran 3,70-4,50% (*yoy*) lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,43%.

3.1.2.2 Prospek Inflasi

Dengan mencermati perkembangan inflasi terkini, tekanan inflasi Provinsi Kepri pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Membaiknya kinerja perekonomian akan mendorong peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat. Di sisi lain kenaikan harga komoditas pangan dan energi global juga akan berpengaruh pada kenaikan inflasi di domestik. Selain itu, penyesuaian harga jual dari beberapa perusahaan FMCG seiring kenaikan bahan baku akan segera ditransmisikan pada peningkatan harga jual kepada konsumen yang akan mendorong peningkatan inflasi di Kepri.

Prospek inflasi IHK Kepri tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dan mendekati batas atas sasaran inflasi nasional tahun 2022 yaitu $3 \pm 1\%$ (*yoy*). Oleh karenanya upaya pengendalian inflasi di tahun ini perlu diintensifkan terutama dengan difokuskan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang diperkirakan akan mendominasi arah inflasi di Kepri. Koordinasi antara TPID dan Satgas Pangan menjadi kunci pengendalian inflasi di Kepri melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif).

Beberapa sumber risiko peningkatan inflasi pada tahun 2022 yang perlu diwaspadai yakni:

1. Meningkatnya harga komoditas global dapat mendorong kenaikan harga bahan baku produksi maupun harga barang jadi, salah satunya

peningkatan harga CPO dan termasuk harga energi global yang dapat mendorong harga minyak goreng serta komoditas yang membutuhkan bahan baku energi akan sangat terdampak.

2. Masih tingginya ketergantungan pasokan bahan makanan terhadap daerah lain menimbulkan adanya kerentanan terhadap gangguan pasokan dari sentra produksi. Selain itu, risiko kenaikan harga pangan juga dipengaruhi oleh potensi peningkatan harga logistik serta anomali cuaca yang berpotensi menggeser jadwal tanam yang berpengaruh terhadap stabilitas pasokan pangan.
3. Dari sisi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kenaikan inflasi bersumber dari harga emas perhiasan yang mengalami peningkatan didorong ketidakpastian global seiring konflik Ukraina-Rusia. Di sisi lain, penyesuaian tarif listrik dan tarif cukai rokok pada tahun 2022 juga akan mendorong tekanan inflasi lebih tinggi.
4. Seiring dengan perkiraan pelonggaran mobilitas masyarakat, permintaan terhadap angkutan udara juga akan meningkat sehingga akan meningkatkan tarif angkutan udara. Pelonggaran kebijakan mobilitas masyarakat, pembukaan border antar negara, pengenaan *fuel surcharge* oleh maskapai seiring peningkatan harga avtur global turut mendorong inflasi angkutan udara lebih tinggi turut mendorong kenaikan harga lebih tinggi.

3.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Bintan

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Seperti halnya perkembangan perekonomian Kepri, kondisi yang sama sampai dengan akhir tahun 2022 juga diperkirakan mengalami peningkatan yang didorong oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas pelaku usaha seiring dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan tahun ini diperkirakan akan ditopang oleh komponen investasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah. Dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) diharapkan akan turut menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan ekonomi diperkirakan didorong oleh kinerja LU utama di Kabupaten Bintan. Kinerja LU perdagangan diperkirakan tumbuh membaik sejalan dengan perbaikan daya beli dan konsumsi masyarakat. Demikian halnya dengan lapangan usaha terkait dengan pariwisata lainnya, seperti transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa hiburan yang diperkirakan mengalami perbaikan setelah Pemerintah memutuskan untuk membuka perbatasan (melonggarkan syarat perjalanan) bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia. Di sisi lain, kinerja LU konstruksi juga diperkirakan dapat tumbuh menguat pada tahun 2022 sejalan dengan realisasi proyek infrastruktur pemerintah maupun swasta yang masih terus berjalan yang sebelumnya tertunda pada tahun 2021.

Dari sisi eksternal, semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di berbagai negara dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi akan mendorong mobilitas secara global dan permintaan ekspor dari negara mitra utama terhadap Kabupaten Bintan. Investasi oleh Pemerintah maupun pihak swasta juga diprakirakan meningkat yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan. Hasil liaison Bank Indonesia menunjukkan bahwa realisasi investasi swasta pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dibanding tahun 2021. Berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah dan beberapa proyek apartemen, hotel dan resort di kawasan pariwisata akan menjadi mendorong meningkatnya investasi bangunan. Sementara itu, investasi non bangunan akan bersumber dari sektor swasta pada industri manufaktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi. Perkembangan realisasi investasi sampai dengan triwulan 1 seperti tersaji pada Tabel di bawah:

Tabel III.1 Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Per Triwulan I Tahun 2022

Sektor		PMA		PMDN	
		Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (Rp Juta)
Sektor Primer	Pertambangan	1	23,5	1	113,5
	Perikanan			2	1.500
	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	613,4	2	837
	Total(Sektor)	2	636,9	5	2450,5
Sektor Sekunder	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	5	3391,8		
	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1	0.0		
	Industri Karet dan Plastik	2	1,2	1	-
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1	183,5	4	-
	Industri Kertas dan Percetakan	1	0.0		
	Industri Lainnya	3	1114,4	2	558.775,7
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3	558	1	-
	Industri Makanan	1	174,2	1	-
	Industri Mineral Non Logam	1	0.0	1	-
	Total(Sektor)	18	5.423,1	10	558775,7
	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	23	5836,5	6
Jasa Lainnya		10	675,3	4	3.218,4
Listrik, Gas dan Air		1	0	0	-
Perdagangan dan Reparasi		2	585	2	-
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran		8	30866,1	2	5.729,8
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi		2	43,3	5	7
Total(Sektor)		46	38.006,2	19,0	136.430,3
Total		66	44.066,2	34,0	697.656,5

Sumber: NSWI, BKPM, 2022

Konsumsi rumah tangga sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan masih melanjutkan tren pemulihan seiring dengan mobilitas masyarakat yang meningkat didukung oleh semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 dan pembukaan sektor pariwisata. Peningkatan konsumsi juga didorong oleh berlanjutnya stimulus pemerintah melalui bansos dan kartu pra kerja untuk menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, inflasi diperkirakan masih terkendali sehingga akan turut berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong konsumsi rumah tangga. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia hingga triwulan I 2022 menunjukkan adanya tren kenaikan optimisme masyarakat. Namun demikian, peningkatan harga komoditas pangan global serta kemunculan varian baru COVID-19 tetap perlu diwaspadai.

Peningkatan konsumsi rumah tangga tercermin dari optimisme peningkatan penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Optimisme tersebut terindikasi dari Indeks Penghasilan Konsumen dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang menunjukkan peningkatan. Berlanjutnya program bantuan sosial (Bansos) akan turut menopang daya beli dari kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Konsumsi pemerintah juga diperkirakan dapat tumbuh meningkat didorong oleh realisasi belanja modal dan proyek yang tertunda pada

tahun lalu. Dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan nasional terkini serta perkembangan kasus COVID-19 yang semakin terkendali, perekonomian Kepri pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh menguat dari tahun lalu.

3.1.3.2 Prospek Inflasi

3.2 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Pada masa pandemi COVID-19 ini, Pendapatan Daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer mengalami dampaknya. Terkait Pendapatan Transfer, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Terbitnya PMK tersebut selain berpengaruh pada pendapatan daerah juga berpengaruh pada belanja daerah, karena PMK tersebut juga mengatur penggunaan Dana Transfer Umum dan Dana Insentif Daerah.

3.2.1 Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.1.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang diambil pada P-RKPD 2022 terkait pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD), memperhitungkan kembali/menaikkan target Pendapatan Asli Daerah dengan mengupayakan langkah-langkah strategis, stimulan kepada wajib pajak dan mengupayakan penagihan piutang pajak daerah
- b. Perubahan Perpres terkait dana bagi hasil

3.2.1.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Terkait dengan rasionalisasi target PAD Tahun 2022, terdapat beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan terkait belanja daerah yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Kabupaten Bintan tetap melaksanakan kegiatan/tidak melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang bersifat mandatory karena dapat mengakibatkan terhadap tidak tercapainya, dipotong atau ditundanya transfer dari pusat;
- b. Pemerintah Kabupaten Bintan dapat melakukan refokusing/rasionalisasi belanja dalam APBD Tahun 2022 hanya sebagian dari selisih antara belanja yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Bintan dikurangi dengan Belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pelaksanaan terhadap *mandatory spending* adalah sebesar Rp182.373.686.354,- dengan mempertimbangkan terhadap pemenuhan prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD dan belanja wajib penunjang operasional/pelayanan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- c. Pemerintah Kabupaten Bintan perlu mempertimbangkan kembali penganggaran Belanja hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dirasionalisasi, Sebagai alternatif untuk menutupi defisit belanja APBD tahun Anggaran 2022. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (3) dan 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menggunkan Belanja hibah dan Belanja Bantuan Sosial

sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;

- d. Pemerintah Kabupaten Bintan memperhitungkan kembali formulasi besaran pemberian Tambahan Penghasilan kepada ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan melakukan rasionalisasi kembali terhadap perhitungan gaji ASN sesuai dengan formasi ASN yang ada, untuk menutupi kekurangan terhadap rasionalisasi belanja/kegiatan dalam APBD Tahun 2022.

3.2.1.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Beberapa kebijakan terkait pembiayaan daerah pada P-RKPD Tahun 2022, antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Bintan dapat memanfaatkan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia (SiLPA) untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sebagai alternatif untuk menutupi defisit belanja dengan mempertimbangkan tidak menerima usulan kegiatan baru pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan arah kebijakan yang diambil, berikut struktur perubahan pendapatan dan belanja yang direncanakan pada P-RKPD Tahun 2022.

Tabel III.2 Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2022

No.	Uraian	RKPD 2022	P-RKPD 2022	Selisih
4	Pendapatan	1.216.884.341.773	1.255.361.572.468	38.477.230.695
4.1	Pendapatan Asli Daerah	393.242.228.678	393.379.243.878	137.015.200
4.1.01	Pajak Daerah	318.424.564.000	318.424.564.000	-
4.1.02	Retribusi Daerah	10.797.207.000	10.797.207.000	-
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	10.477.231.219	10.477.231.219	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	53.543.226.459	53.680.241.659	137.015.200
4.2	Pendapatan Transfer	800.129.913.095	861.982.328.590	61.852.415.495
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	749.144.465.800	810.996.881.295	61.852.415.495
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	50.985.447.295	50.985.447.295	-
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.512.200.000	-	- 23.512.200.000
4.3.01	Hibah	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	23.512.200.000	-	- 23.512.200.000
5	Belanja	1.283.434.868.319	1.298.285.014.519	14.850.146.200
5.1	Belanja Operasi	n.a.	988.209.287.594	
5.1.01	Belanja Pegawai	n.a.	530.849.734.202	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	n.a.	393.965.851.313	
5.1.04	Belanja Subsidi	n.a.	1.900.000.000	
5.1.05	Belanja Hibah	n.a.	54.964.902.079	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	n.a.	6.528.800.000	
5.2	Belanja Modal	n.a.	181.819.721.366	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	n.a.	7.805.000.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	n.a.	49.284.725.521	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	n.a.	84.902.446.685	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	n.a.	38.405.506.157	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	n.a.	1.422.043.003	
5.3	Belanja Tidak Terduga	n.a.	10.708.506.359	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	n.a.	10.708.506.359	
5.4	Belanja Transfer	n.a.	117.547.499.200	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	n.a.	32.922.177.100	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	n.a.	84.625.322.100	
	Total Surplus (Defisit)	- 66.550.526.546	- 42.923.442.051	23.627.084.495
6	Pembiayaan	66.550.526.546	42.923.442.051	- 23.627.084.495
6.1	Penerimaan Pembiayaan	66.550.526.546	42.923.442.051	- 23.627.084.495
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.550.526.546	42.923.442.051	- 23.627.084.495
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-

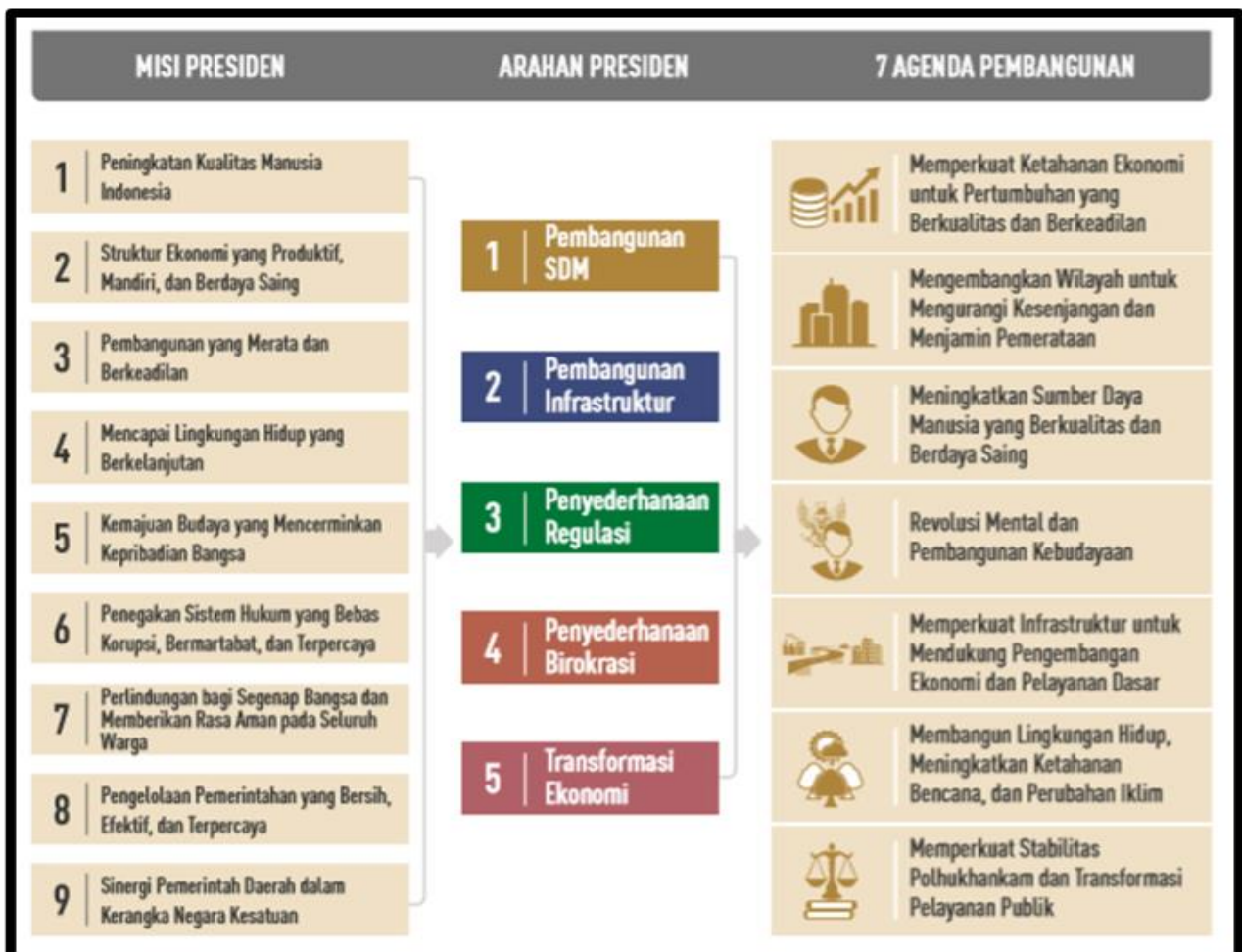
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Sasaran Pembangunan Nasional

Visi dan misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 9 misi dan 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah.

Gambar IV.1 Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: RKP 2022

Tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera”.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran dari prioritas Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, meliputi:

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
- b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
- c. Terpenuhinya layanan dasar
- d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
- e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan
- f. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Prioritas nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki sasaran sebagai berikut:

- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
- b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
- d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
- e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa

- f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Sasaran pembangunan dari prioritas ini, yaitu:
 - a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
 - b. Meningkatnya konektivitas wilayah
 - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan
 - d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien
 - e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Prioritas nasional keenam ini memiliki beberapa sasaran, yaitu:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - c. Pembangunan Rendah Karbon
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Sasaran dari prioritas Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik, yaitu:
 - a. Konsolidasi Demokrasi
 - b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - c. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap
 - d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

4.1.2 Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya menjadi visi daerah sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Adapun visi RPJMD adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk

menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga

pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, setiap misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan	Optimalisasi Sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku
		Peningkatan Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
		Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
		Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku
2.	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku
			Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku
			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
			Persentase Koperasi yang berkualitas

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
			Persentase UMKM yang Naik Kelas
			Nilai Realisasi Investasi PMA
			Nilai Realisasi Investasi PMDN
		Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD
		Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku
			Indeks Ketahanan Pangan
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks SPBE
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja
			Indeks Pelayanan Publik
			Opini Laporan Keuangan
		Managemen ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)
		Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.	Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan
			Tingkat Pengangguran Terbuka
		Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif	Indeks Desa Membangun

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
5.	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
			Prevalensi Stunting
		Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah
			Rata-rata lama Sekolah
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)
		Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)
			SDI (<i>Sport Development Index</i>)
6.	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekonomi Budaya
			Nilai Warisan Budaya
			Nilai Ekspresi Budaya
			Nilai Budaya Literasi
		Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
			Indeks Ketahanan Nasional
7.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak
			Cakupan Pelayanan Air Limbah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
			Cakupan Pelayanan Drainase
			Cakupan Pelayanan Persampahan
			Pengurangan Luas Kawasan Kumuh
		Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase jalan kondisi baik
			Rasio Konektivitas Angkutan Darat
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan
			Rasio Konektivitas Angkutan Laut

Sumber: RPJMD Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

4.1.3 Sasaran Pembangunan Kabupaten Bintan

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bintan, menyatakan bahwa visi Bupati Bintan pembangunan jangka menengah Kabupaten bintan dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.” Untuk mewujudkan visi tersebut, Bupati menuangkannya dalam 5 (lima) misi yang terdiri dari:

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi lokal yang berdaya saing;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya melayu;
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
4. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang; dan
5. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Secara operatif, misi-misi tersebut di atas dijabarkan menjadi tujuan pembangunan daerah sebagai upaya menjawab isu strategis dan permasalahan

pembangunan. Berikut merupakan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bintan:

1. Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing;
3. Meningkatkan nilai nilai budaya melayu dalam pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas infrastuktur di semua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang; dan
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Ketercapaian dari masing-masing tujuan diformulasikan melalui sebuah pernyataan yang terukur dalam bentuk sasaran pembangunan daerah. RPJMD 2021-2026 yang terdiri dari:

1. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi;
5. Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan;
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
7. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
8. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya;
9. Meningkatnya budaya literasi;
10. Meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan;
11. Meningkatnya penanganan pengangguran;
12. Berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk;
13. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
14. Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
15. Meningkatnya capaian infrastruktur dasar;
16. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
17. Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai rtrw;
18. Meningkatnya pengurangan resiko bencana;
19. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
20. Meningkatnya birokrasi yang kapabel;

21. Meningkatnya pelayanan publik yang prima; dan
22. Meningkatnya kualitas inovasi daerah.

Tahun pertama rencana pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bintan menetapkan arah kebijakan “Peningkatan pembangunan kewilayahan dalam rangka mengembangkan, pemulihan ekonomi dan kemandirian wilayah”. Arah kebijakan ini juga sekaligus merupakan tema pelaksanaan pembangunan daerah di tahun 2022.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Pandemi COVID-19 merupakan *unprecedented shock* yang mengubah secara signifikan pola interaksi antar manusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan social distancing dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak COVID-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung

proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan dan tata kelola ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan reformasi sistem kesehatan, reformasi pendidikan keterampilan, serta reformasi perlindungan sosial akan menjadi bagian dari reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Dengan penerjemahan tema ke dalam fokus prioritas tersebut, diharapkan dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk menuju proses Transformasi Ekonomi Indonesia dalam koridor jangka menengah dan panjang. Transformasi ekonomi yang merupakan arahan Presiden telah dituangkan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Di samping itu, transformasi ekonomi merupakan salah satu strategi mencapai sasaran dalam Visi Indonesia 2045, utamanya agar Indonesia ditargetkan keluar dari negara *Middle Income Trap* (MIT) di tahun 2036 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Namun demikian, akibat pandemi COVID-19, target tersebut terkoreksi dari tahun 2036 menjadi tahun 2043, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,0 persen. Adanya perubahan pola di masyarakat seperti sistem kesehatan, peningkatan *tren telework*, akselerasi digitalisasi dan otomasi, peningkatan peran artificial intelligence dan big data serta ekonomi hijau, menjadi faktor utama dalam merumuskan redesain strategi transformasi ekonomi ke depan. Strategi redesain transformasi ekonomi tersebut bersifat jangka menengah-panjang, yang akan difokuskan pada (1) SDM berdaya saing, (2) produktivitas sektor ekonomi, (3) ekonomi hijau (*green economic*), (4) transformasi digital, (5) integrasi ekonomi domestik, dan (6) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam pelaksanaan dan pencapaian sarannya, strategi tersebut dilakukan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai instrumen utama. Mengingat konsep transformasi ekonomi merupakan pekerjaan bersama dan memerlukan orkestrasi, maka dibutuhkan koordinasi mulai dari perencanaan hingga implementasi yang terintegrasi dalam rencana pembangunan baik jangka menengah-panjang serta bersifat antarlintas pelaku, lintas sektor dan wilayah serta lintas antartingkat pemerintahan.

Melalui tema pembangunan yang diangkat pada RKP Tahun 2022, Pemerintah menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Percepatan pemulihan ekonomi
2. Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)

Untuk merefleksikan terhadap keberhasilan atas pemenuhan sasaran, Pemerintah juga menetapkan indikator untuk masing-masing sasaran. Indikator yang merefleksikan keberhasilan sasaran pertama terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca, sedangkan indikator yang merefleksikan keberhasilan pada sasaran kedua yaitu indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan. Target yang ditetapkan untuk masing-masing indikator dapat dilihat pada Gambar

Gambar IV.2 Indikator dan Target Sasaran RKP 2022



Sumber: RKP 2022

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, dengan target capaian secara berturut-turut 103-105 dan 104-106.

Merujuk pada Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia masih percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam kisaran 4,5%-5,3%. Angka ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam kisaran angka pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada RKP 2022, hanya saja batas bawah yang ditetapkan sebelumnya menjadi batas atas target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

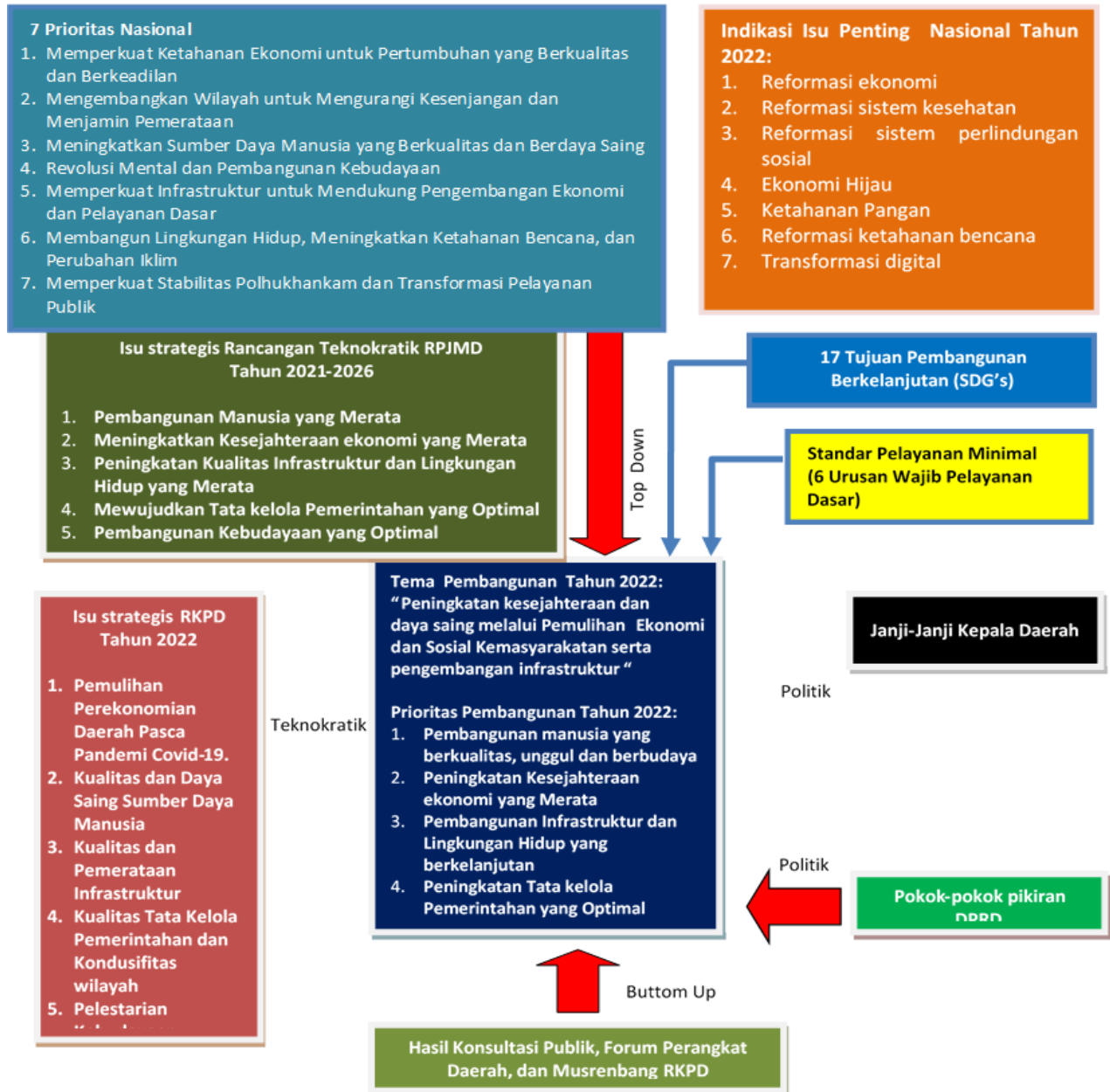
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun pertama akan diarahkan pada *Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional*. Pada tahun pertama ini, fokus utama kebijakan

pembangunan yang akan dijalankan ialah terkait dengan upaya pemulihan ekonomi serta menjamin layanan Kesehatan masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun pertama ini ialah peningkatan kapasitas permodalan bagi UMKM, pemberian insentif dan akses permodalan bagi para industri yang mengalami kesulitan ekonomi, peningkatan promosi wisata melalui berbagai event dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi, peningkatan kapasitas dan perlindungan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penopang ekonomi desa, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif, mengembangkan layanan Pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata, mendorong keberlanjutan sekolah dari dasar hingga perguruan tinggi, serta pengoptimalan pengelolaan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif.

Perumusan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Indikasi Isu Penting Nasional Tahun 2022, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Standar Pelayanan Minimal, Janji-janji kepala daerah dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik), serta hasil Konsultasi publik (pendekatan Bottom up) sebagaimana terlihat pada skema berikut ini.

Gambar IV.3 Perumusan tema dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022



Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 yaitu: “Peningkatan kesejahteraan dan daya saing melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat serta pengembangan infrastruktur”. Berdasarkan tema di atas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yaitu:

1. Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya
2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang Merata
3. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Optimal

Tabel IV.2 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No.	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022
1.	Peningkatan Kesejahteraan ekonomi yang Merata	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan	Optimalisasi Sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	3.297 miliar rupiah
			Peningkatan Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2.387 miliar rupiah
			Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,73
			Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	27,10 miliar rupiah
2.	Peningkatan Kesejahteraan ekonomi yang Merata	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	55,744 miliar rupiah
				Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	39,77%
				Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	8,54%
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	5,80%
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	3,00%

No.	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022
				Persentase Koperasi yang berkualitas	52,04%
				Persentase UMKM yang Naik Kelas	30,21%
				Nilai Realisasi Investasi PMA	22.500 miliar rupiah
				Nilai Realisasi Investasi PMDN	12.500 miliar rupiah
			Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	5,59%
			Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	2.177 miliar rupiah
				Indeks Ketahanan Pangan	62,80
3.	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Optimal	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks SPBE	2,85
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	BB
				Indeks Pelayanan Publik	B
				Opini Laporan Keuangan	WTP
			Managemen ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Baik (286)
			Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,37
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,13

No.	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022
4.	Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya	Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	6,01%
				Tingkat Pengangguran Terbuka	10,00%
	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Optimal		Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif	Indeks Desa Membangun	0.6779 (Desa Berkembang)
5.	Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,27 Tahun
				Prevalensi Stunting	15,80%
			Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,93 Tahun
				Rata-rata lama Sekolah	10,14 Tahun
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100%
			Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.20
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,50
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	75,05
			Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	0,504
				SDI (<i>Sport Development Index</i>)	6,84
6.	Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekonomi Budaya	28,11
				Nilai Warisan Budaya	48,84
				Nilai Ekspresi Budaya	1,49

No.	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022
				Nilai Budaya Literasi	72,25
			Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,46
				Indeks Ketahanan Nasional	2,81
7.	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	95,50
				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	96,15%
				Cakupan Pelayanan Air Limbah	91,32%
				Cakupan Pelayanan Drainase	48,1%
				Cakupan Pelayanan Persampahan	67,80%
				Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	145,27 Ha
			Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase jalan kondisi baik	63,25%
				Rasio Konektivitas Angkutan Darat	18
				Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan	23,33
				Rasio Konektivitas Angkutan Laut	31,82

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana

program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. RKPD tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Bintan, RPJMN dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Tema RKPD Tahun 2022 adalah:

“Peningkatan pembangunan kewilayahan dalam rangka mengembangkan, pemulihan ekonomi dan kemandirian wilayah”.

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan “Bintan Rumah Kita” yang tercermin dalam kemandirian wilayah sebagai hasil dari upaya-upaya pemulihan ekonomi berbasis pengembangan wilayah.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Bintan pada tahun 2022 seperti yang ditunjukkan oleh Gambar di bawah:

Tabel IV.3 Prioritas RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2022



Berdasarkan prioritas yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan target indikator kinerja makro Kabupaten Bintan Tahun 2022 seperti yang tersaji pada Tabel IV.5. Target tersebut juga sudah disesuaikan dengan target indikator makro Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023.

Tabel IV.4 Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,53	74,53-76,70
2	Angka Kemiskinan	%	6,25	6,25-6,00
3	Angka Pengangguran	%	8,81	10,00-8,81
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4±2	2,5-4,5
5	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	-	85,0
6	Indeks Gini	Indeks	0,329	0,320-0,322

Secara rinci sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan disampaikan sebagai berikut:

4.2.3.1 Prioritas Daerah 1, Peningkatan Kemandirian Wilayah dalam Pembangunan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka peningkatan kemandirian wilayah dalam pembangunan tercantum dalam Tabel IV.6.

Tabel IV.5 Sasaran, Indikator, dan Target PD 1

No.	Sasaran/Indikator	Data Awal	Target 2022	Target 2023
1.	Meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan			
1.1	Persentase penduduk miskin ekstrem yang ditangani	54,46%	54,43%	54,42%
2.	Berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk			
2.1	Indek Gini ratio	0,334	0,332	0,329
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat			
3.1	Angka Kriminalitas	66,03	64	63

Strategi pencapaian sasaran pada prioritas daerah 1 dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan penanganan kesejahteraan melalui peningkatan peran kelembagaan potensi sosial kesejahteraan masyarakat, peningkatan rehabilitas pada sasaran SPM bidang Sosial, Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan sosial pada penduduk miskin dengan bantuan sosial, peningkatan pemberdayaan ekonomi, peningkatan validitas data kemiskinan dan peningkatan pengeolaan taman makam pahlawan sebagai bagian dari PSKS;
2. Pengurangan kesenjangan pendapatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas desa/kelurahan, pengembangan kawasan strategis pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat didesa dan kelurahan, penguatan ekonomi lokal;
3. Pencegahan konflik sosial dan SARA melalui peningkatan deteksi dini, peningkatan wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama penguatan FKUB dan tokoh masyarakat serta pelaksanaan pemilu yang damai

4. Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan cinta tanah air melalui penanganan gangguan keamanan sebagaimana SPM, peneggakan perda yang humanis

4.2.3.2 Prioritas Daerah 2, Peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing dan berkeadilan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam prioritas daerah 2 pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6 Sasaran, Indikator, dan Target PD2

No.	Sasaran/Indikator	Data Awal	Target 2022	Target 2023
1.	Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan			
1.1	Harapan lama sekolah	13,1 tahun	13,3 tahun	13,4 tahun
1.2	Rata-rata lama sekolah	8,44 tahun	8,6 tahun	8,7 tahun
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
2.1	Usia harapan hidup	70,38 tahun	70,58 tahun	70,68 tahun
3	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender			
3.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,1	93,2	93,3
4	Meningkatnya budaya literasi			
4.1	Indek pembangunan literasi masyarakat	n.a.	10	15

Strategi pencapaian sasaran pada prioritas daerah Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui strategi-strategi yang terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan partisipasi sekolah sesuai dengan Standar pelayanan minimal, peningkatan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidikan dan pendidik, penguatan kurikulum lokal
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan usaha kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dengan pencapaian akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rujukan, pencapaian standar pelayanan minimal, perwujudan Kesehatan keluarga dalam konsep Indeks keluarga sehat, peningkatan pencegahan stunting melalui pelaksanaan strategi spesifik dan sensitif, peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah, peningkatan kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (Germa) dalam proses pemberdayaan masyarakat serta penguatan Kabupaten Sehat
3. Pengendalian laju pertumbuhan dan KB melalui penyusunan grand desain kependudukan, peningkatan advokasi dalam pengendalian pernikahan usia

anak, peningkatan partisipasi KB pada alat kontrasepsi jangka panjang, penguatan keluarga dalam berKB dengan kelompok UPPKS, BKB, BKL dan BKR

4. Peningkatan pemuda dan olahraga difokuskan pada peningkatan pemuda dalam organisasi kepemudaan, peningkatan kemandirian pemuda, peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, peningkatan prasana pemuda dan olahraga, peningkatan olahraga masyarakat dalam mendukung GERMAS, pencarian bibit atlet dan penguatan kualitas pelatih serta penguatan kelompok olahraga
5. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, cadangan pangan, keaneragaman pangan, pengawasan mutu pangan, pelaksanaan B2SA, dan pengurangan daerah rentan pangan serta penguatan kelembagaan pangan
6. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender difokuskan pada peningkatan strategi PUG dalam pembangunan penguatan ARG dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan perempuan dalam tindak kekerasan, peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas kabupaten layak anak sebagai perwujudan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan anak berkebutuhan khusus
7. Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan baik daerah atau masyarakat, pengembangan pojok baca, peningkatan literasi di masyarakat

4.2.3.3 Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah

Sasaran yang akan diwujudkan dalam prioritas daerah 3 pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7 Sasaran, Indikator, dan Target PD3

No.	Sasaran/Indikator	Data Awal	Target 2022	Target 2023
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah			
1.1	Indek konektivitas	75	75	75
2	Meningkatnya capaian infrastruktur dasar			
2.1	Persentase cakupan universal akses	88,18	88,67	89,13
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
3.1	IKLH (indek Kualitas Lingkungan Hidup)	66,37	63,65	64,14
4	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW			
4.1	Kesesuaian pemanfaatan tata ruang	100%	100%	100%
5	Meningkatnya pengurangan resiko bencana			
5.1	IRBI (Indeks Resiko Bencana)	132,4	127,5	126

Strategi pencapaian sasaran pada prioritas daerah Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah dilaksanakan melalui strategi-strategi yang terdiri dari:

1. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan dan drainase, peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, peningkatan keselamatan angkutan serta kenyamanan angkutan;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas udara, air sesuai baku mutu, penurunan gas efek rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati, penanganan limbah B3, peningkatan kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan di masyarakat;
3. Penanganan dan pengelolaan sampah melalui pembangunan TPA regional, penyediaan sarana dan prasarana TPA/TPS/TPST, penanganan 3R; dan
4. Peningkatan ketaatan tata ruang melalui peningkatan informasi pola ruang dan struktur ruang, peneggakan penggunaan lahan sesuai dengan RTRW.
5. Peningkatan cakupan universal akses melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi penduduk
6. Peningkatan penanganan kumuh melalui pemberian rumah layak huni baik korban bencana , korban proyek, maupun untuk pencegahan kumuh, peningkatan penanganan kumuh, kualitas permukiman dengan PSU yang baik; dan
7. Peningkatan penanganan bencana difokuskan pada peningkatan kesiapan siaga bencana, penguatan desa tangguh bencana, kualitas dokumen bencana, penguatan logistik dan rehab rekon, peningkatan respon time, peningkatan wilayah manajemen kebakaran.

4.2.3.4 Prioritas Daerah 4, Peningkatan Kualitas Perekonomian Daerah Dengan Fokus Pada Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19

Sasaran yang akan diwujudkan dalam prioritas daerah 4 pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.8 Sasaran, Indikator, dan Target PD4

No.	Sasaran/Indikator	Data Awal	Target 2022	Target 2023
1.	Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi			
1.1	Persentase pertumbuhan kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	8%	8,2%	8,25%
2	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi			
2.1	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	39,1%	39,4%	39,5%

No.	Sasaran/Indikator	Data Awal	Target 2022	Target 2023
3	Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi			
3.1	Persentase pertumbuhan pendapatan pariwisata	-2%	3%	3%
3.2	Persentase pertumbuhan kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran dalam PDRB	-0,44%	0,74%	0,84%
4	Meningkatnya investasi			
4.1	Persentase pertumbuhan realisasi investasi	0,5	1,3%	1,4%
5	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya			
5.1	Persentase nilai nilai budaya melayu yang di lestarikan	2,04%	8%	12%
6	Meningkatnya penanganan pengangguran			
6.1	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	8,86%	7,94%	7,92%

Strategi pencapaian sasaran pada prioritas daerah peningkatan daya saing ekonomi dilakukan melalui:

1. Meningkatkan kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, mempertahankan LP2B, meningkatkan alternatif pangan lain dalam mempertahankan ketersediaan pangan, dan meningkatkan kapasitas petani;
2. Meningkatkan kontribusi perikanan dan kelautan dalam pertumbuhan melalui peningkatan produksi tangkap, produksi budidaya, penanganan pasca panen dan perlindungan nelayan;
3. Meningkatkan kualitas pembangunan industri melalui pengelolaan kawasan industri, penguatan sentra industri, peningkatan kualitas OVOP (*One Village One Product*) dan peningkatan promosi industri serta peningkatan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional);
4. Pengembangan pariwisata dimasa pasca pandemi melalui peningkatan destinasi untuk wisatawan nusantara, promosi pariwisata pengembangan desa wisata;
5. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemetaan sektor ekonomi kreatif, pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, dan pengembangan sistem ekonomi kreatif;
6. Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM melalui penguatan, pemberdayaan koperasi sebagai akses permodalan usaha mikro, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, meningkatkan akses permodalan untuk usaha mikro dan pengembangan jejaring pemasaran usaha mikro;
7. Peningkatan pembangunan perdagangan melalui peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan, pengawasan perkembangan toko modern, peningkatan kualitas produk ekspor, perlindungan terhadap konsumen terkait dengan UTP;

8. Peningkatan nilai investasi melalui peningkatan kemudahan perijinan, promosi perijinan, peningkatan tindak lanjut aduan masyarakat dalam pelayanan perijinan;
9. Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalui pelestarian budaya benda dan tak benda, penguatan lembaga budaya melayu, pengembangan kesenian tradisional dan penguatan kelompok kesenian; dan
10. Penanganan pengangguran melalui penyusunan perencanaan tenaga kerja, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penanganan hubungan perselisihan kerja.

4.2.3.5 Prioritas Daerah 5, Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik tercantum dalam Tabel IV.8.

Tabel IV.9 Sasaran, Indikator, dan Target PD 5

No.	Sasaran/Indikator	Data Awal	Target 2022	Target 2023
1.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel			
1.1	Nilai SAKIP	64,68	70	72
1.2	IPKD (indeks Pengelolaan keuangan daerah)	62,61	63,39	63,50
2.	Meningkatnya Birokrasi yang kapabel			
2.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,42	2,42	2,57
2.2	Indek Kualitas Kebijakan	70	71	72
2.3	IPA (Indeks Profesionlisme ASN)	48	50	52
3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima			
3.1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	82,15	82,4
4	Meningkatnya kualitas inovasi daerah			
4.1	Indek inovasi daerah	40	43	45

Strategi pencapaian sasaran prioritas daerah optimalisasi birokrasi pemerintahan yang efektif akan dilakukan melalui:

1. Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan;
2. Peningkatan akuntabilitas dan kapasitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan pengelolaan keuangan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset;
3. Peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan kapasitas APIP, peningkatan akuntabilitas tingkat perangkat daerah, peningkatan evaluasi perencanaan daerah;
4. Meningkatkan pembangunan yang berbasis elektronik melalui peningkatan *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monitoring* dalam satu sistem pemerintahan daerah,

- peningkatan kabupaten pintar, peningkatan pengelolaan satu data, peningkatan keamanan informasi penting;
5. Peningkatan kapasitas pengelolaan kepegawaian melalui peningkatan kualitas pendidikan pegawai, peningkatan kompetensi struktural dan fungsional serta peningkatan kemudahan pelayanan kepegawaian;
 6. Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kemudahan, kenyamanan pelayanan; dan
 7. Peningkatan inovasi daerah melalui peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan, pengembangan inovasi dan teknologi

4.2.3.6 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Bintan dan Nasional Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2022; Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2022 dengan sasaran PN RKP Tahun 2022; Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan PN RKP Tahun 2021; serta Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2022, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.10 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022

No.	Prioritas Nasional Tahun 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Perekonomian Daerah Dengan Fokus Pada Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kemandirian Wilayah dalam Pembangunan
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing dan berkeadilan
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing dan berkeadilan
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah

6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

4.2.3.7 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Bintan dan Nasional Tahun 2022

Tabel IV.11 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022
1.	Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya	Peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing dan berkeadilan
2.	Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang Merata	Peningkatan Kualitas Perekonomian Daerah Dengan Fokus Pada Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19 Peningkatan Kemandirian Wilayah dalam Pembangunan
3.	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah
4.	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Optimal	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2022 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2021 untuk RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2022. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan.

Perubahan-perubahan yang terjadi termasuk didalamnya pendanaan pada tahapan KUA dan PPAS serta Pergeseran APBD Tahun 2022 kemudian menjadi bagian dari P-RKPD Tahun 2022.

5.1 Rencana Kerja

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Permendagri 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka program pembangunan 2022 seperti Tabel di bawah

5.2 Pendanaan Pembangunan Daerah

5.2.1 Prioritas Pendanaan

Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, pendanaan pembangunan masih diarahkan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Untuk pendanaan pemerintah daerah, pemerintah pusat telah melakukan refocusing TKDD dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pada kegiatan pascabencana COVID-19 khususnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pemanfaatan Dana Desa untuk merespons secara cepat dampak bencana COVID-19. Diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat yakni penanganan bencana pandemi COVID-19.

5.2.2 Sumber Pendanaan Pembangunan

5.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendanaan yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah akan digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi pemerintah di berbagai sektor prioritas pembangunan, khususnya penyediaan layanan umum dan dasar yang termasuk di dalamnya penanggulangan pandemi COVID-19 dan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

5.2.2.2 Pendapatan Transfer

Terdapat dua jenis pendapatan transfer yang menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah, yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah daerah (dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau).

Untuk pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat, mendanai program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat (ear marked) yang mendukung prioritas nasional dalam RKP Tahun 2023. Oleh karena itu, arah kebijakan TKDD didasarkan pada tema RKP Tahun 2023 yaitu "Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".

Secara umum, arah kebijakan TKDD, mencakup antara lain:

1. Melanjutkan kebdakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah;
2. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian/lembaga dan TKDD terutama DAK Fisik;
3. Melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan adanya penambahan untuk belanja kesehatan prioritas;
4. Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK), penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah, dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan; dan
5. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan mendukung sektor prioritas.

5.2.3 Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pendanaan

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2023 diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan baik sumber pendanaan APBD. Strategi yang perlu dilakukan untuk melakukan optimalisasi tersebut di antaranya:

1. Melanjutkan proyek yang sedang berjalan

Perangkat daerah perlu untuk melihat kegiatan prioritas apa saja yang sedang berjalan untuk dapat melakukan percepatan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat selesai sebelum masa RPJMD berakhir. Percepatan pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi belanja pemerintah.

2. Mengakomodasi kegiatan prioritas

Kegiatan dengan tingkat urgensi tinggi seperti program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 dan arahan dari pedoman umum penyusunan RKPD yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 perlu dilaksanakan dan dalam penyediaan pendanaan pada kegiatan tersebut perangkat daerah perlu memanfaatkan sumber-sumber pendanaan *existing* dengan melakukan: (a) penajaman/realokasi kegiatan pada kegiatan yang lebih prioritas; (b) memaksimalkan penggunaan sisa dana transfer dari pusat maupun provinsi; dan (c) mengoptimalkan alokasi telah tersedia pada dokumen perencanaan pendanaan jangka menengah.

3. Meningkatkan kesiapan proyek

Penyiapan investasi pemerintah perlu segera dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi kegiatan untuk menjaga momentum pembangunan. Kesiapan usulan kegiatan pembangunan sangat diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat secara konkret berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan. Maka diperlukan penajaman terhadap persiapan proyek baik pada kesiapan strategis maupun kesiapan teknis.

Kesiapan pada aspek strategis mencakup kesesuaian kegiatan dengan prioritas dan pemenuhan aspek kelayakan ekonomi. Pada tahun 2023 pendanaan terhadap kegiatan akan difokuskan pada (a) penanganan pandemi COVID-19; (b) PEN; (c) PN; (d) Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), dan (e) Arahan Bupati. Setelah kegiatan tersebut telah sesuai dengan fokus pendanaan tahun 2022 maka kegiatan yang siap untuk dilaksanakan diharapkan memenuhi aspek kelayakan ekonomi dengan memberikan efek pengganda pada perekonomian seperti pada penciptaan lapangan kerja.

Sedangkan pada sisi teknis kegiatan yang dibiayai, sudah harus siap dengan beberapa hal yang perlu dipenuhi, seperti (a) sudah memiliki lahan yang siap digunakan; dan (b) dokumen pendukung kegiatan seperti Feasibility Study (FS)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Detail Engineering Design (DED), dan dokumen lelang. Aspek teknis lainnya yang perlu ditingkatkan kesiapannya adalah manajemen kegiatan yang meliputi organisasi proyek, prosedur

pelaksanaan, SDM, serta sumber daya pendukungnya. Apabila kegiatan yang diusulkan belum memenuhi kriteria kesiapan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2023, maka perlu dilakukan restrukturisasi dan percepatan proses penyiapan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bagian ini menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan sebagai indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD tahun berkenaan. Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi capaian indikator makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Disajikan pada Tabel VI.1 berikut ini:

Tabel VI.1 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun P-RKPD 2022	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
1.	CAPAIAN KINERJA MAKRO			
1.1	Indeks Pembangunan Manusia	74,13	74,53-76,70	75,2
1.2	Angka Kemiskinan	6,36%	6,25-6,00%	6,12%
1.3	Angka Pengangguran	8,86%	10,00-8,81%	7,88%
1.4	Pertumbuhan Ekonomi	-4,28%	2,5-4,5%	6,5%
1.5	Pendapatan per kapita		Rp85,0 juta	
1.6	Rasio Gini	0,334	0,320-0,322	0,318
2.	CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH			
2.1	Persentase pertumbuhan kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	8%	8,2%	8,35%
2.2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	39,1%	39,3%	39,7%
2.3	Persentase pertumbuhan pendapatan pariwisata	-2%	2,5%	3,5%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun P-RKPD 2022	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
2.4	Persentase pertumbuhan kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran dalam PDRB	-0,44%	0,64%	1,04%
2.5	Persentase pertumbuhan realisasi investasi	0,5%	1,2%	1,6%
2.6	Harapan Lama Sekolah	13,1 Tahun	13,3 Tahun	13,9 Tahun
2.7	Rata rata Lama sekolah	8,44 Tahun	8,6 Tahun	9,0 Tahun
2.8	Usia Harapan Hidup	70,38 Tahun	70,58 Tahun	70,98 Tahun
2.9	Indek Pembangunan Gender (IPG)	93,1	93,2	93,55
2.10	Persentase nilai nilai budaya melayu yang di lestarikan	2,04%	2%	18%
2.11	Indek pembangunan literasi masyarakat	n.a.	10	40
2.12	Persentase penduduk miskin ekstrem yang ditangani	54,46%	54,44%	54,36%
2.13	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	8,86%	8,81%	7,88%
2.14	Indek Gini ratio	0,334	0,332	0,318
2.15	Angka kriminalitas	66,03	63	60
2.16	Indek konektivitas	75	75	75
2.17	Persentase cakupan universal akses	88,18%	88,67%	90%
2.18	IKLH (indek Kualitas Lingkungan Hidup)	66,37	63,65	64,71
2.19	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	100%	100%	100%
2.20	IRBI (Indeks Resiko Bencana)	132,40	127,5	120
2.21	Nilai SAKIP	64,68	70	78
2.22	IPKD (Indeks Pengelolaan keuangan daerah)	62,61	63,39	64,5

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun P-RKPD 2022	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
2.23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,42	2,42	2,60
2.24	Indek Kualitas Kebijakan	70	71	75
2.25	Indeks Profesionalisme ASN	48	50	61
2.26	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	82,15	83
2.27	Indek inovasi daerah	40	43	60
3.	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
3.1	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar			
3.1.1	Bidang Pendidikan			
3.1.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	100%	100%
3.1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	82%	100%	100%
3.1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	67%	100%	100%
3.1.1.4	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	n.a.	100%	100%
3.1.2	Bidang Kesehatan			
3.1.2.1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	100%	100%	100%
3.1.2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%
3.1.2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun P-RKPD 2022	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
3.1.2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%
3.1.2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%
3.1.2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%
3.1.2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
3.1.2.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
3.1.2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
3.1.2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
3.1.2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
3.1.2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%
3.1.2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%
3.1.2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%
3.1.3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1.3.1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun P-RKPD 2022	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
	terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota			
3.1.3.2	% rumah tangga yang terakses pengelolaan limbah domestik sesuai standar	n.a.	53,5%	90,3%
3.1.4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
3.1.4.1	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%
3.1.4.2	Persentase rumah relokasi program pemerintah yang tertangani	100%	100%	100%
3.1.5	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
3.1.5.1	Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
3.1.5.2	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	88,89%	93,89%	97,22%
3.1.5.3	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	72,22%	77,78%	83,33%
3.1.5.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
3.1.5.5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
3.1.5.6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
3.1.5.7	Persentase pelayanan penyelamatan bencana kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%
3.1.6	Bidang Sosial			
3.1.6.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang	93,7%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun P-RKPD 2022	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
3.1.6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%
3.2	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
3.2.1	Bidang Tenaga Kerja			
3.2.1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	25%	27%	30%
3.2.1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	8,93%	10%	12%
3.2.1.3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	44,44%	53%	65%
3.2.1.4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	n.a	42%	n.a
3.2.2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
3.2.2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	25%	27%	30%
3.2.2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	100%	100%
3.2.2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15	90%	10
3.2.3	Bidang Pangan			
3.2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan	87%	90%	94%
3.2.5	Bidang Lingkungan Hidup			

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun P-RKPD 2022	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
3.2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	66,37	63,65	64,71
3.2.5.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	77%	79%	83%
3.2.5.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	84%	80%	50%
3.2.6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
3.2.6.1	Perekaman KTP elektronik	98,86%	98,92%	99,00%
3.2.6.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	30,33%	40%	90%
3.2.6.3	Persentase anak berakte kelahiran (usia 0-18 th)	90,35%	91,10%	91,54%
3.2.6.4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100%
3.2.7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
3.2.7.1	Persentase peningkatan status desa mandiri	5,88%	29,41%	49,02%
3.2.8	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
3.2.8.1	TFR (Angka Kelahiran Total) per WUS usia 15-49 tahun	22,22	2,16 rata-rata anak per wanita	22,1
3.2.8.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	55%	62%	73%
3.2.8.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	12,70%	7,7%	8,66%
3.2.9	Bidang Perhubungan			
3.2.9.1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	75%	75%	80%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun P-RKPD 2022	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
3.2.10	Bidang Komunikasi dan Informatika			
3.2.10.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%
3.2.10.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	27,00%	45%	65%
3.2.10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	70,73%	85%	76%
3.2.11	Bidang Koperasi dan UKM			
3.2.11.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (koperasi aktif)	56,2%	58,2%	62,2%
3.2.11.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Usaha kecil)	39,11%	41,11%	45,11%
3.2.12	Bidang Penanaman Modal			
3.2.12.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	2%	2%	5%
3.2.13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
3.2.13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100%	100%	100%
3.2.13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	100%	100%	100%
3.2.13.3	Peningkatan prestasi olahraga	0%	5%	10%
3.2.14	Bidang Statistik			
3.2.14.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun P-RKPD 2022	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
3.2.14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%
3.2.15	Bidang Persandian			
3.2.15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	64,42	73,46	91,55
3.2.16	Bidang Kebudayaan			
3.2.16.1	Nilai cagar budaya yang dilestarikan	23,08%	20%	100%
3.2.16.2	persentase nilai nilai melayu yang dilestarikan	2,04%	2%	18%
3.2.17	Bidang Perpustakaan			
3.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	45.769	47.242	51.242
3.2.17.2	Persentase perpustakaan aktif Daerah	20%	20%	100%
3.2.17.3	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	n.a.	10%	40%
3.2.17.4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n.a.	10%	40%
3.2.18	Bidang Kearsipan			
3.2.18.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	20%	20%	50%
3.2.18.2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	20%	20%	50%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun P-RKPD 2022	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan			
3.3.1	Bidang Perikanan			
3.3.1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	58.822 ton	59.822 ton	61.822 ton
3.3.2	Bidang Pariwisata			
3.3.2.1	kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	28,58%	25%	25%
3.3.2.2	persentase pertumbuhan wisatan mancanegara	-89%	20%	40%
3.3.2.3	persentaser pertumbuhan wistawan nusantara	-66%	20%	40%
3.3.3	Bidang Pertanian			
3.3.3.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	34,6 ton	37,8 ton	39,5 ton
3.3.3.2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	-18,53%	-0,75%	-2%
3.3.4	Bidang Perdagangan			
3.3.4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	3%	5%	10%
3.3.4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	0,53%	90%	11%
3.3.4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	100%	100%
3.3.5	Bidang Perindustrian			
3.3.5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab	3,4%	4,5%	6%
3.3.5.2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun P-RKPD 2022	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
3.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
3.4.1	Perencanaan dan Keuangan			
3.4.1.1	Rasio PAD	-5,2%	5%	15%
3.4.1.2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,00	3,00	3,00
3.4.1.3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3
3.4.2	Pengadaan			
3.4.2.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani bersama pada kuartal pertama	100%	100%	100%
3.4.2.2	Persentase jumlah pengadaan yang diadakan dengan metode kompetitif	100%	100%	100%
3.4.2.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100%	100%	100%
3.4.3	Kepegawaian			
3.4.3.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	100%
3.4.3.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan Kesehatan)	7%	12%	28%
3.4.3.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15%	17%	20%
3.4.4	Manajemen Keuangan			
3.4.4.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani	4%	4%	4%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun P-RKPD 2022	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
	APBD			
3.4.4.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	5%	5%	5%
3.4.4.3	Manajemen Aset	100%	100%	100%
3.4.4.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	10,16%	9,9%	9%
3.4.5.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%

BAB VII PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan Daerah yang berisi tentang pendahuluan, evaluasi RKPD tahun berjalan, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RKPD berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021-2026, kebijakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2020 dan arahan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Terdapat keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi kedudukannya, baik arahan kebijakan Provinsi Kepulauan Riau dan RKP Nasional terutama arahan kebijakan makro ekonomi, pengurangan kesenjangan antar wilayah, penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi dan menjadi dasar pijakan penjabaran secara operasional. Hal ini merupakan upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2022.

RKPD Kabupaten Bintan 2022 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 yang diawali penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan disepakati dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif.

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar disosialisasikan kepada masyarakat dan

pemangku kepentingan pembangunan daerah agar dapat diakses oleh semua pihak.

2. Perangkat Daerah (PD) berkewajiban melaksanakan program-program RKPD Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022 berpedoman pada RKPD.
3. Guna menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pemantauan secara berkala, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam perencanaan, perumusan kebijakan pembangunan, dan pengawasan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2022.
5. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), maka seluruh Kepala PD harus memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD 2022.

Pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2022 perlu didukung komitmen bersama antara perangkat daerah, DRPD dan masyarakat serta kalangan dunia usaha dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.